



**MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIC INDONESIA**

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR PM 83 TAHUN 2017

TENTANG

PERATURAN KESELAMATAN PENERBANGAN SIPIL BAGIAN 139

(CIVIL AVIATION SAFETY REGULATION PART 139)

TENTANG BANDAR UDARA *(AERODROME)*

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa ketentuan mengenai bandar udara telah diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 55 Tahun 2015 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 139 *(Civil Aviation Safety Regulation Part 139)* tentang Bandar Udara *(Aerodrome)*;
- b. bahwa dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 55 Tahun 2015 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 139 *(Civil Aviation Safety Regulation Part 139)* tentang Bandar Udara *(Aerodrome)* masih terdapat kekurangan dan perlu disempurnakan sesuai dengan ICAO Annex 14 edisi ke-7 amandemen ke-13;xc
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 139 *(Civil Aviation Safety Regulation Part 139)* tentang Bandar Udara *(Aerodrome)*;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2012 tentang Pembangunan dan Pelestarian Lingkungan Hidup Bandar Udara (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5295);
3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
4. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 20 Tahun 2009 tentang Sistem Manajemen Keselamatan (*Safety Management System*);
6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 41 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Otoritas Bandar Udara;
7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1844) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 44 Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 816);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PERATURAN KESELAMATAN PENERBANGAN SIPIL BAGIAN 139 (*CIVIL AVIATION SAFETY REGULATION PART 139*) TENTANG BANDAR UDARA (*AERODROME*).

Pasal 1

- (1) Memberlakukan Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 139 (*Civil Aviation Safety Regulations Part 139*) tentang Bandar Udara (*Aerodrome*).
- (2) Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 139 (*Civil Aviation Safety Regulations Part 139*) tentang Bandar Udara (*Aerodrome*) sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 2

Ketentuan lebih lanjut mengenai Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 139 (*Civil Aviation Safety Regulations Part 139*) tentang Bandar Udara (*Aerodrome*) diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara.

Pasal 3

Direktur Jenderal *Perhubungan* Udara melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan ini dan melaporkan kepada Menteri Perhubungan.

Pasal 4

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 55 Tahun 2015 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 139 (*Civil Aviation Safety Regulation Part 139*) tentang Bandar Udara (*Aerodrome*); dan
- b. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 24 Tahun 2005 tentang Pemberakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) 03-7067-2005 Mengenai Teknis Fasilitas Pertolongan Kecelakaan Penerbangan dan Pemadam Kebakaran (PKP-PK) di Bandar Udara Sebagai Standar Wajib
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 September 2017

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BUDI KARYA SUMADI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 20 September 2017


DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2017 NOMOR 1295

Salinan sesuai dengan aslinya


KEPALA BUREAU HUKUM,
WAHJU ADJI H. SH, DESS
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19651022 199203 1 001

Lampiran Peraturan Menteri
Perhubungan Republik Indonesia
Nomor : PM 83 TAHUN 2017
Tentang
Peraturan Keselamatan Penerbangan
Sipil Bagian 139 (Civil Aviation Safety
Regulation Part 139) Tentang Bandar
Udara (Aerodrome)
Tanggal : 13 September 2017

PERATURAN KESELAMATAN PENERBANGAN SIPIL

(P.K.P.S)

BAGIAN 139

BANDAR UDARA

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

REPUBLIK INDONESIA

DAFTAR ISI

SUB BAGIAN 139 A	UMUM	12
139.001	Pemberlakuan	12
139.003	Bandar Udara.....	12
139.005	Definisi.....	12
139.007	Manual Standar Keselamatan Bandar Udara	15
SUB BAGIAN 139 B	SERTIFIKAT BANDAR UDARA	16
SUB BAGIAN 139 B.1	SERTIFIKAT BANDAR UDARA	16
139.009	Persyaratan untuk Sertifikat Bandar Udara	16
139.011	Permohonan Sertifikat Bandar Udara	16
139.013	Pemberian Sertifikat Bandar Udara	16
139.015	Penolakan Permohonan Sertifikat Bandar Udara	17
139.017	Data dan Informasi Sertifikat Bandar Udara.....	17
139.019	Perubahan/Amandemen Sertifikat Bandar Udara.....	18
139.021	Sertifikat Bandar Udara Tidak Dapat Dipindahtangankan	18
139.023	Masa Berlaku Sertifikat Bandar Udara	18
139.025	Pembekuan atau Pencabutan Sertifikat Bandar Udara.....	18
139.027	Pencabutan Sertifikat Bandar Udara atas Permintaan Penyelenggara Bandar Udara	19
139.029	Sertifikat Bandar Udara Sementara (<i>Temporary Aerodrome Certificate</i>).....	19
SUB BAGIAN 139 B.2	KEWAJIBAN PENYELENGGARA BANDAR UDARAYANG MEMILIKI SERTIFIKAT BANDARUDARA20
139.031	Kompetensi Pejabat Organisasi Penyelenggara Bandar Udara.....	20
139.033	Kewajiban Manajemen dalam Penyelenggaraan Bandar Udara....	22
139.035	Kompetensi Personel Bandar Udara.....	23
139.037	Pendidikan dan/atau Pelatihan bagi Personel Bandar Udara.....	24
139.039	Pengoperasian dan Pemeliharaan Bandar Udara.....	25
139.041	Prosedur Pedoman Pengoperasian Bandar Udara (<i>Aerodrome Manual Procedure</i>).....	25
139.043	Pemberitahuan tentang Penyimpangan.....	26
139.045	Marka Bandar Udara (<i>Aerodrome Marking</i>).....	26
139.047	Indikator Arah Angin Secara Umum	26
139.049	Indikator Arah Angin untuk Persyaratan pada <i>Runway</i> Tertentu	26
139.051	Sistem Indikator Kemiringan <i>Approach Visual</i> (<i>Visual Approach Slope Indicator System</i>).....	27
139.053	Sistem Penerangan pada Daerah Pergerakan	27
139.055	Pemeriksaan Sistem Penerangan	27
139.057	<i>Airport Emergency Plan</i>	28
139.059	Komite Penanggulangan Keadaan Darurat Bandar Udara	29
139.061	Pengujian Terhadap <i>Airport Emergency Plan</i>	29

139.063	Sistem Manajemen Keselamatan Bandar Udara (<i>Safety Management System</i>).....	30
139.065	Inspeksi Kelayakan Operasi Bandar Udara(<i>Airport Serviceability Inspections</i>)	31
139.067	<i>Internal Safety Audit</i> oleh Penyelenggara Bandar Udara	32
139.069	Badan Hukum Indonesia Yang Bergerak di Kegiatan Penunjang Bandar Udara	32
139.071	Perencanaan dan Pelaksanaan Pekerjaan-Pekerjaan Bandar Udara.....	32
139.073	Program Pemeliharaan Perkerasan (<i>Pavement</i>) dan Alat Bantu Visual	32
139.075	Manajemen Bahaya Hewan Liar (<i>Wildlife Hazard Management</i>) dan Lingkungan.....	33
139.077	Pemberitahuan dan Pelaporan.....	33
139.079	Pencegahan Terjadinya <i>Runway Incursion</i>	34
139.081	<i>Runway Safety</i>	35
SUB BAGIAN 139 C REGISTER BANDAR UDARA		36
139.083	Persyaratan untuk Register Bandar Udara.....	36
139.085	Permohonan Register Bandar Udara	37
139.087	Pemberian Register Bandar Udara	37
139.089	Penolakan Permohonan Register Bandar Udara	38
139.091	Data dan Informasi Register Bandar Udara.....	38
139.093	Data dan Informasi Tempat Pendaratan dan Lepas Landas Helikopter (<i>Heliport</i>).....	38
139.095	Data dan Informasi Bandar Udara Perairan (<i>Water Aerodrome</i>)	39
139.097	Perubahan/Amandemen Register Bandar Udara.....	39
139.099	Register Bandar Udara Tidak Dapat Dipindahtangankan.....	39
139.101	Masa Berlaku Register Bandar Udara	40
139.103	Pencabutan Register Bandar Udara atas Permintaan Penyelenggara Bandar Udara	40
139.105	Pembekuan atau Pencabutan Registrasi oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Udara.....	40
139.107	Register Bandar Udara Sementara (<i>Temporary Aerodrome Register</i>).....	41
139.109	Penerapan Standar untuk Register Bandar Udara	41
139.111	Kompetensi Personel.....	41
139.113	Pemberitahuan atas Perubahan dalam Informasi yang Dipublikasikan dalam <i>AIP</i>	42
139.115	Pemeriksaan Keselamatan	42
SUB BAGIAN 139 D BUKU PEDOMAN PENGOPERASIAN BANDAR UDARA.....		43
SUB BAGIAN 139 D.1 BUKU PEDOMAN PENGOPERASIAN BANDAR UDARA (<i>AERODROME MANUAL</i>)		43
139.117	Format Buku Pedoman Pengoperasian Bandar Udara (<i>Aerodrome Manual</i>).....	43

139.119	Penyimpanan Buku Pedoman Pengoperasian Bandar Udara (<i>Aerodrome Manual</i>).....	44
139.121	Informasi Yang Tercakup Dalam Buku Pedoman Pengoperasian Bandar Udara (<i>Aerodrome Manual</i>).....	44
139.123	Perubahan Buku Pedoman Pengoperasian Bandar Udara (<i>Aerodrome Manual</i>).....	44
139.125	Pengawas Buku Pedoman Pengoperasian Bandar Udara (<i>Aerodrome Manual</i>).....	45
139.127	Status Buku Pedoman Pengoperasian Bandar Udara (<i>Aerodrome Manual</i>).....	45

SUB BAGIAN 139 D.2 BUKU PEDOMAN PENGOPERASIAN BANDAR UDARA BEREKISTER(REGISTERED AERODROME MANUAL) 34

139.129	Penyiapan Buku Pedoman Pengoperasian Bandar Udara (<i>Registered Aerodrome Manual</i>).....	34
139.131	Format Buku Pedoman Pengoperasian Bandar Udara Beregister (<i>Registered Aerodrome Manual</i>).....	34
139.133	Penyimpanan Buku Pedoman Pengoperasian Bandar Udara Beregister (<i>Registered Aerodrome Manual</i>).....	46
139.135	Informasi Yang Tercakup Dalam Buku Pedoman Pengoperasian Bandar Udara Beregister(<i>Registered Aerodrome Manual</i>)	46
139.137	Perubahan Buku Pedoman Pengoperasian Bandar Udara Beregister (<i>Registered Aerodrome Manual</i>)	47
139.139	Pengawas Buku Pedoman Pengoperasian Bandar Udara <i>Beregister(RegisteredAerodrome Manual)</i>	47
139.141	Status Buku Pedoman Pengoperasian Bandar Udara Beregister (<i>Registered Aerodrome Manual</i>)	47

SUB BAGIAN 139 D.3BUKU PEDOMAN PENGOPERASIAN TEMPAT Pendaratan dan Lepas Landas HELIKOPTER (HELIPORT MANUAL) 47

139.143	Penyiapan Buku Pedoman Pengoperasian Tempat Pendaratan dan Lepas Landas <i>Helikopter (Heliport Manual)</i>	48
139.145	Format Penyiapan Buku Pedoman Pengoperasian Tempat Pendaratan dan Lepas Landas <i>Helikopter (HeliportManual)</i>	48
139.147	Penyimpanan Buku Pedoman Pengoperasian Tempat Pendaratan dan Lepas Landas Helikopter (<i>Heliport Manual</i>)	48
139.149	Informasi Yang Tercakup Dalam Penyiapan Buku Pedoman Pengoperasian Tempat Pendaratan dan Lepas Landas Helikopter (<i>Heliport Manual</i>).....	48
139.151	Perubahan Buku Pedoman Pengoperasian Tempat Pendaratan dan Lepas Landas helikopter (<i>Heliport Manual</i>)	49
139.153	Pengawas Buku Pedoman Pengoperasian Tempat Pendaratan dan Lepas Landas Helikopter (<i>Heliport Manual</i>)	49
139.155	Status Buku Pedoman Pengoperasian Tempat Pendaratan dan Lepas Landas Helikopter (<i>Heliport Manual</i>).....	50

SUB BAGIAN 13 D.4 BUKU PEDOMAN PENGOPERASIAN BANDAR UDARA PERAIRAN (WATER AERODROME MANUAL)	39
139.157 Penyiapan Buku Pedoman Pengoperasian Bandar Udara (<i>Water Aerodrome Manual</i>)	50
139.159 Format Buku Pedoman Pengoperasian Bandar Udara Perairan (<i>Water Aerodrome Manual</i>)	50
139.161 Penyimpanan Buku Pedoman Pengoperasian Bandar Udara (<i>Water Aerodrome Manual</i>)	50
139.163 Informasi Yang Tercakup Dalam Buku Pedoman Pengoperasian Bandar Udara Perairan (<i>Water Aerodrome Manual</i>)	51
139.165 Perubahan Buku Pedoman Pengoperasian Bandar Udara Perairan (<i>Water Aerodrome Manual</i>)	51
139.167 Pengawas Buku Pedoman Pengoperasian Bandar Udara Perairan (<i>Water Aerodrome Manual</i>)	52
139.169 Status Buku Pedoman Pengoperasian Bandar Udara Perairan (<i>Water Aerodrome Manual</i>)	52
SUB BAGIAN 139 E PETUGAS PELAPORAN (REPORTING OFFICER)...	52
139.171 Petugas Pelaporan (<i>Reporting Officer</i>)	52
SUB BAGIAN 139 F OBSTACLE DAN HAZARD.....	53
139.173 Pemantauan Ruang Udara.....	53
139.175 Pemberitahuan Adanya <i>Obstacle</i>	53
SUB BAGIAN 139 G PENGECUALIAN (EXEMPTION).....	53
139.177 Pengecualian dari Kewajiban (<i>Exemption</i>).....	53
SUB BAGIAN 139 H JAM OPERASI.....	54
139.179 Penetapan Jam Operasi Bandar Udara	54
139.181 Tata Cara dan Prosedur Penetapan Jam Operasi Bandar Udara..	54
SUB BAGIAN 139 I PELAYANAN PERTOLONGAN KECELAKAAN PENERBANGANDAN PEMADAM KEBAKARAN (PKP-PK)	55
139.183 Penerapan	55
139.185 Tugas dan Fungsi dari PKP-PK	55
139.187 Persetujuan Pemberian Pelayanan	55
139.189 Penerbitan Standar Teknis Pengoperasian Bandar Udara.....	55
139.191 Standar Teknis Pengoperasian Bandar Udara	56
139.193 Persyaratan yang harus dipenuhi oleh Penyedia Layanan PKP-PK.....	56
139.195 Standar dan Persyaratan Pelayanan PKP-PK.....	56
139.197 Perbedaan (<i>Inconsistency</i>) antara Standar Teknis dan Operasi MOS 139 dengan <i>Chapter 9 Annex 14</i>	56
139.199 Persyaratan Pengetahuan, Peralatan, dan Keahlian untuk Menghadapi Bahaya Keselamatan Penerbangan	56
139.201 Kewajiban Mempertahankan Pelayanan PKP-PK	57

139.203	<i>Response Time</i>	57
139.205	Bangunan dan Fasilitas.....	57
139.207	Pengumuman Masa Berlaku Pelayanan PKP-PK.....	57
139.209	Persediaan Bahan Pemadam Api.....	57
139.211	Kendaraan dan Peralatan PKP-PK.....	57
139.213	Kendaraan dan Peralatan untuk Lingkungan yang Sulit.....	57
139.215	Pemeriksaan dan Pengujian Kendaraan dan Peralatan PKP-PK.....	58
139.217	Komunikasi.....	58
139.219	Personel PKP-PK.....	58
139.221	Standar Kesehatan Personel PKP-PK.....	58
139.223	Kualifikasi dan Pelatihan Personel PKP-PK.....	58
139.225	Manual Pengoperasian PKP-PK.....	58
139.227	Amandemen terhadap Manual Pengoperasian PKP-PK.....	58
139.229	Pencatatan <i>Accident</i> dan <i>Incident</i>	59
139.231	Organisasi.....	59
139.233	Sistem Ralat/Pembetulan untuk Suatu Kegagalan Pelayanan.....	59
139.235	<i>Quality Control</i>	59
139.237	Manajemen Keselamatan (<i>Safety Management</i>).....	59
139.239	Pemberitahuan tentang perubahan-perubahan kepada Direktur Jenderal Perhubungan Udara.....	59

APPENDIX

Appendix 1	<i>Item-Item Yang Dimasukkan dalam Buku Pedoman Pengoperasian Bandar Udara Bersertifikat(Aerodrome Manual).....</i>	61
Appendix 2A	<i>Item-Item Yang Dimasukkan dalam Buku Pedoman Pengoperasian Bandar Udara Beregister(Registered Aerodrome Manual).....</i>	71
Appendix 2B	<i>Item-Item Yang Dimasukkan dalam Buku Pedoman PengoperasianTempat Pendaratan dan Lepas Landas Helikopter (Heliport Manual)</i>	75
Appendix 2C	<i>Item-Item Yang Dimasukkan dalam Buku Pedoman Bandar Udara Perairan Beregister(Water Aerodrome Manual)</i>	77
Appendix 3	Format Permohonan untuk mendapatkan Sertifikat /Register Bandar Udara	79
Appendix 4	Persyaratan untuk menyelenggarakan Pemeriksaan Keselamatan Bandar Udara Bersertifikat dan Beregister termasuk <i>Heliport</i> dan <i>Water Aerodrome</i>	81

SUB BAGIAN 139 A UMUM

139.001 Pemberlakuan

PKPS Bagian 139 mengatur tentang pengoperasian bandar udara yang meliputi:

- a. Umum;
- b. Sertifikat Bandar Udara;
- c. Register Bandar Udara;
- d. Buku Pedoman Pengoperasian Bandar Udara;
- e. Petugas Pelaporan (*Reporting Officer*);
- f. *Obstacle* dan *Hazard*;
- g. Pengecualian (*Exemption*);
- h. Jam Operasi; dan
- i. Pelayanan Pertolongan Kecelakaan Penerbangan dan Pemadam Kebakaran (PKP-PK).

139.003 Bandar Udara

Bandar udara yang dimaksud dalam PKPS Bagian 139 adalah:

- a. Bandar Udara (*Aerodrome*);
- b. Tempat Pendaratan dan Lepas Landas Helikopter (*Heliport*); atau
- c. Bandar Udara Perairan (*Water Aerodrome*).

139.005 Definisi

Dalam PKPS Bagian 139, yang dimaksud dengan istilah berikut ini adalah :

Aerodrome adalah kawasan di daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu yang hanya digunakan sebagai tempat pesawat udara mendarat dan lepas landas.

Aerodrome works adalah pekerjaan konstruksi atau pemeliharaan yang dilakukan di sebuah bandar udara, pada atau di dekat daerah pergerakan (*movement area*), yang dapat menciptakan *obstacle* atau membatasi operasional lepas landas dan pendaratan pesawat udara secara normal.

Aeronautical Information Publication (AIP) adalah publikasi yang diterbitkan oleh instansi pemerintah yang berwenang, berisi informasi dan data aeronautika yang dibutuhkan untuk navigasi penerbangan.

Aeronautical Information Services (AIS) adalah pelayanan yang diberikan pada suatu wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam penyediaan informasi dan data aeronautika yang dibutuhkan untuk keselamatan, keteraturan dan efisiensi navigasi penerbangan.

Angkutan Udara Niaga adalah angkutan udara untuk umum dengan memungut pembayaran.

Angkutan Udara Bukan Niaga adalah angkutan udara yang digunakan untuk melayani kepentingan sendiri yang dilakukan untuk mendukung kegiatan yang usaha pokoknya selain di bidang angkutan udara.

Apron adalah suatu area bandar udara di darat yang telah ditentukan untuk mengakomodasi pesawat udara dengan tujuan naik turun penumpang, bongkar muat kargo, penumpang, surat, pengisian bahan bakar, parkir, atau pemeliharaan pesawat udara.

Bandar Udara adalah kawasan di daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu yang digunakan sebagai tempat pesawat udara mendarat dan lepas landas, naik turun penumpang, bongkar muat barang, dan tempat perpindahan intra dan antarmoda transportasi, yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan penerbangan, serta fasilitas pokok dan fasilitas penunjang lainnya.

Bandar Udara Beregister adalah bandar udara yang penyelenggaranya telah diberikan register bandar udara.

Bandar Udara Bersertifikat adalah bandar udara yang penyelenggaranya telah diberikan sertifikat bandar udara.

Bandar Udara Perairan (*Water Aerodrome*) adalah bandar udara yang digunakan untuk keberangkatan, kedatangan atau pergerakan pesawat udara (*seaplane*).

Daerah Manuver (*Manouvering Area*) adalah bagian dari bandar udara yang digunakan untuk lepas landas (*take-off*), pendaratan (*landing*) dan *taxiing* pesawat udara, tidak termasuk *apron*.

Daerah Pergerakan (*Movement Area*) adalah bagian bandar udara yang digunakan untuk lepas landas (*take-off*), mendarat (*landing*) dan *taxiing* pesawat udara, yang terdiri dari daerah manuver dan *apron*.

Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perhubungan Udara.

Fasilitas dan Peralatan Bandar Udara adalah semua fasilitas dan peralatan baik di dalam maupun di luar batas-batas bandar udara, yang dibangun atau dipasang (diinstalasi) dan dipelihara untuk tujuan melayani kedatangan, keberangkatan dan pergerakan permukaan pesawat udara, termasuk pelayanan darat pesawat udara.

Fasilitas Pertolongan Kecelakaan Penerbangan dan Pemadam Kebakaran (PKP-PK) adalah semua kendaraan PKP-PK, peralatan operasional PKP-PK dan bahan pendukungnya serta personel yang disediakan di setiap bandar udara untuk memberikan pertolongan kecelakaan penerbangan dan pemadam kebakaran.

Kategori Bandar Udara Untuk PKP-PK adalah suatu tingkatan yang dihitung atau dirumuskan berdasarkan panjang keseluruhan dan lebar maksimum badan pesawat udara terbesar yang beroperasi di bandar udara tersebut serta mempertimbangkan jumlah pergerakannya.

Maksimum Kapasitas Tempat Duduk Pesawat Udara (*Maximum Passenger Seating Capacity*) adalah jumlah maksimum tempat duduk penumpang di pesawat udara berdasarkan sertifikat tipe pesawat udara.

Manual of Standard (MOS) adalah suatu dokumen yang dinamakan "Standar Teknis dan Operasi (*Manual of Standard/MOS*) Bagian 139" Volume I Bandar Udara (*Aerodrome*), Volume II Tempat Pendaratan dan Lepas Landas Helikopter

(*Heliport*), Volume III Bandar Udara Perairan (*Water Aerodrome*), Volume IV Pertolongan Kecelakaan Penerbangan dan Pemadam Kebakaran (PKP-PK) yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Udara, dan sewaktu-waktu dapat mengalami perubahan.

Marka (*Marking*) adalah simbol atau kumpulan simbol yang ditampilkan di atas permukaan daerah pergerakan untuk memberikan informasi aeronautika.

Menteri adalah Menteri Perhubungan.

Obstacle adalah seluruh objek tetap (terlepas apakah sementara atau permanen) dan bergerak, atau bagian-bagiannya, yang berlokasi di daerah yang ditujukan untuk pergerakan permukaan (*surface movement*) pesawat udara; atau menjulang di atas suatu permukaan yang ditetapkan untuk melindungi pesawat udara yang sedang terbang; atau menjulang di luar dari permukaan tersebut dan dinilai berbahaya untuk navigasi penerbangan.

Obstacle Free Zone adalah ruang udara di atas *inner approach surface*, *inner transitional surface*, *balked landing surface*, dan bagian dari *strip* yang dikelilingi oleh permukaan (*surfaces*) dimaksud, yang tidak dipenetrasi oleh halangan (*obstacle*) tetap selain yang bermassa rendah dan rapuh (*frangible mounted*) yang dibutuhkan untuk navigasi penerbangan.

Obstacle Limitation Surface adalah suatu rangkaian dataran yang berhubungan dengan masing-masing landas pacu (*runway*) pada bandar udara, yang menjelaskan batasan yang diperbolehkan bagi objek untuk menjulang ke ruang udara sehingga operasi pesawat udara dapat dilakukan dengan aman (*safe*).

Operasi PKP-PK adalah operasi yang diselenggarakan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan PKP-PK.

Pedoman Pengoperasian Bandar Udara (*Aerodrome Manual*) adalah dokumen yang terdiri dari data dan informasi operasional, prosedur pengoperasian dan prosedur perawatan fasilitas bandar udara termasuk semua perubahannya yang telah disetujui oleh Direktur Jenderal.

Personel Bandar Udara adalah personel bandar udara yang terkait langsung dengan pelaksanaan pengoperasian dan/atau pemeliharaan fasilitas bandar udara.

Pertolongan Kecelakaan Penerbangan dan Pemadam Kebakaran (untuk selanjutnya disebut PKP-PK) adalah unit bagian dari penanggulangan keadaan darurat.

Penyedia Pelayanan PKP-PK Bandar Udara, adalah orang atau organisasi yang memberikan pelayanan PKP-PK di bandar udara.

Penyelenggara Bandar Udara (*Aerodrome Operator*) adalah unit penyelenggara bandar udara, badan usaha bandar udara, dan/atau Badan Hukum Indonesia yang mengoperasikan bandar udara khusus.

Rambu (*Marker*) adalah tanda yang dipasang untuk menunjukkan adanya *obstacle* atau batas-batas tertentu dalam pengoperasian bandar udara.

Register Bandar Udara adalah tanda bukti terpenuhinya persyaratan keselamatan penerbangan dalam pengoperasian bandar udara yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Udara untuk bandar udara yang melayani pesawat udara dengan kapasitas maksimum 30 (tiga puluh) tempat duduk.

Runway Excursion adalah suatu kejadian di bandar udara ketika pesawat udara yang berada pada permukaan *runway* keluar di ujung atau sisi dari permukaan *runway*.

Runway Incursion adalah keberadaan pesawat udara, kendaraan, manusia ataupun hewan yang tidak seharusnya berada pada area *take-off* dan *landing* yang berpotensi menjadi *hazard* bagi pesawat udara yang telah diberi izin untuk *landing* dan *take-off* di *runway*.

Runway Safety adalah suatu usaha untuk mencegah terjadinya *incident/accident* (kejadian/kecelakaan) pesawat udara yang terjadi di *runway*.

Runway Strip adalah suatu daerah atau wilayah tertentu termasuk landas pacu dan *stopway* (bila ada *stopway*) dimaksudkan untuk :

- a. Mengurangi resiko kerusakan pesawat udara pada saat tergelincir keluar landas pacu; dan
- b. Melindungi pesawat udara yang terbang di atasnya pada saat *take-off* atau *landing*.

Safety Management System adalah suatu pendekatan sistematis yang bertujuan untuk mengatur keselamatan termasuk struktur organisasi yang diperlukan, akuntabilitas, kebijakan, dan prosedur.

Sertifikat Bandar Udara (Aerodrome Certificate) adalah tanda bukti terpenuhinya persyaratan keselamatan penerbangan dalam pengoperasian bandar udara yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Udara untuk bandar udara yang melayani pesawat udara dengan kapasitas lebih dari 30 (tiga puluh) tempat duduk.

Taxiway Strip adalah daerah termasuk *taxiway* yang ditujukan untuk melindungi pesawat udara yang beroperasi di *taxiway* dan untuk menurunkan risiko kerusakan pada pesawat akibat meluncur keluar dari *taxiway*.

Tempat Pendaratan dan Lepas Landas Helikopter (Heliport) adalah tempat pendaratan dan lepas landas helikopter di daratan (*surface level heliport*), di atas gedung (*elevated heliport*), di anjungan lepas pantai/kapal (*helideck*), dan di *shipboard*.

Unserviceable Area adalah bagian dari daerah pergerakan yang tidak dapat dipergunakan untuk pergerakan pesawat udara.

Work Area adalah bagian dari bandar udara yang dipergunakan sebagai tempat pemeliharaan atau pekerjaan pembangunan/konstruksi yang sedang berjalan yang dapat membahayakan keselamatan operasi pesawat udara.

139.007 Manual Standar Keselamatan Bandar Udara

1. Ketentuan mengenai PKPS Bagian 139 ini dijadikan sebagai acuan dalam membuat manual standar teknis dan operasi keselamatan bandar udara. Penjabaran lebih lanjut tertuang di dalam Standar Teknis dan Operasi (*Manual of Standard/MOS*) Bagian 139 yang terbagi dalam:

- a. Volume I tentang Bandar Udara (*Aerodrome*);
 - b. Volume II tentang Tempat Pendaratan dan Lepas Landas Helikopter (*Heliport*);
 - c. Volume III tentang Bandar Udara Perairan (*Water Aerodrome*); dan
 - d. Volume IV tentang Pertolongan Kecelakaan Penerbangan dan Pemadam Kebakaran (PKP-PK).
2. Standar Teknis dan Operasi (*Manual of Standard/MOS*) Bagian 139 sebagaimana dimaksud butir 1 diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal.

SUB BAGIAN 139 B SERTIFIKAT BANDAR UDARA

SUB BAGIAN 139 B.1 Sertifikat Bandar Udara

139.009 Persyaratan untuk Sertifikat Bandar Udara

Bandar udara wajib memiliki sertifikat, bilamana:

- a. digunakan untuk melayani rute penerbangan dari dan ke luar negeri; atau
- b. bandar udara yang melayani pesawat udara dengan kapasitas lebih dari 30 (tiga puluh) tempat duduk.

139.011 Permohonan Sertifikat Bandar Udara

1. Permohonan sertifikat bandar udara diajukan secara tertulis oleh penyelenggara bandar udara kepada Direktur Jenderal.
2. Permohonan sertifikat bandar udara harus dilengkapi dengan isian format yang telah disediakan oleh Direktur Jenderal sebagaimana pada Appendix 3.
3. Permohonan sertifikat bandar udara harus melampirkan salinan Buku Pedoman Pengoperasian Bandar Udara (*Aerodrome Manual*) termasuk buku manual sistem manajemen keselamatan operasi bandar udara (*Airport Safety Management System Manual*) dan *Airport Emergency Plan (AEP)*.
4. Untuk bandar udara yang melayani angkutan udara niaga dengan rute penerbangan dari dan ke luar negeri, permohonan sertifikat bandar udara harus menambahkan lampiran bukti persyaratan kelestarian lingkungan yang ditunjukkan dengan adanya izin lingkungan atau dokumen lingkungan yang disahkan oleh instansi yang berwenang.

139.013 Pemberian Sertifikat Bandar Udara

1. Direktur Jenderal akan menerbitkan sertifikat bandar udara apabila:
 - a. tersedia fasilitas dan peralatan sesuai dengan Standar Teknis dan Operasi (*Manual of Standard/MOS*) Bagian 139 Volume I Bandar Udara (*Aerodrome*) dan Volume IV Pertolongan Kecelakaan Penerbangan dan Pemadam Kebakaran (PKP-PK);

- b. tersedia prosedur pengoperasian bandar udara untuk menjamin keselamatan pesawat udara;
 - c. tersedia Buku Pedoman Pengoperasian Bandar Udara (*Aerodrome Manual*) yang diterima atau disetujui (*accepted*) dengan memuat semua informasi tentang bandar udara dan sesuai persyaratan pada peraturan Sub Bagian 139 D.1;
 - d. telah dilaksanakan Sistem Manajemen Keselamatan Operasi Bandar Udara yang diterima atau disetujui (*accepted*) dengan ketentuan:
 - 1) untuk bandar udara baru adanya Buku Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Operasi Bandar Udara (*Aerodrome SMS Manual*) dan *SMS implementation plan*; atau
 - 2) untuk bandar udara yang telah beroperasi adanya Buku pedoman sistem manajemen keselamatan operasi bandar udara (*Aerodrome SMS Manual*) yang mencantumkan *safety performance indicator* dan target.
 - e. tersedia bukti dokumen persyaratan kelestarian lingkungan, untuk bandar udara yang melayani rute penerbangan dari dan ke luar negeri;
 - f. telah memiliki dokumen penetapan lokasi atau Rencana Induk Bandar Udara;
 - g. Direktur Jenderal meyakini bahwa pemohon sertifikat mempunyai kompetensi organisasi untuk mengoperasikan dan mempertahankan kondisi bandar udara senantiasa memenuhi persyaratan keselamatan.
2. Apabila Direktur Jenderal menerima permohonan dan menerbitkan sertifikat bandar udara, maka akan:
- a. memberi tahu secara tertulis bahwa bandar udara tersebut telah bersertifikat; dan
 - b. mempublikasikan dalam AIP Indonesia, data dan informasi bandar udara termasuk status bandar udara telah bersertifikat.
3. Pengaturan lebih lanjut terkait sertifikat bandar udara diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal.

139.015 Penolakan Permohonan Sertifikat Bandar Udara

Apabila Direktur Jenderal menolak penerbitan sertifikat bandar udara maka Direktur Jenderal harus memberikan pemberitahuan tertulis beserta alasannya kepada pemohon, selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah dinyatakan ditolak.

139.017 Data dan Informasi Sertifikat Bandar Udara

Sertifikat bandar udara harus memuat data dan informasi sekurang-kurangnya:

- a. nama bandar udara;
- b. lokasi bandar udara;
- c. status dan penggunaan;
- d. *Aerodrome Reference Point (ARP)*;
- e. penyelenggara bandar udara;
- f. dimensi *runway*;
- g. *Aerodrome Reference Code (ARC)*;
- h. tipe *runway*;
- i. pesawat udara kritikal yang beroperasi;
- j. kategori Bandar Udara untuk PKP-PK;

- k. kondisi operasi tertentu terhadap pelayanan pesawat udara kritikal, jika tersedia;
- l. pembatasan operasi pada bandar udara, jika ada;
- m. penyimpangan yang diizinkan (*authorized deviation*), jika ada; dan
- n. pengecualian (*exemption*).

139.019 Perubahan/Amandemen Sertifikat Bandar Udara

- 1. Perubahan/amandemen sertifikat bandar udara dapat dilakukan secara langsung oleh Direktur Jenderal atau atas permintaan penyelenggara bandar udara setelah dilakukan evaluasi.
- 2. Perubahan/amandemen sertifikat bandar udara dapat dilakukan apabila ada perubahan data atau informasi dalam sertifikat bandar udara.
- 3. Direktur Jenderal menyampaikan perubahan data dan informasi pada sertifikat bandar udara ke AIS.

139.021 Sertifikat Bandar Udara Tidak Dapat Dipindahtangankan

Sertifikat bandar udara tidak dapat dipindahtangankan.

139.023 Masa Berlaku Sertifikat Bandar Udara

Sertifikat bandar udara berlaku selama 5 (lima) tahun kecuali sertifikat bandar udara dicabut.

139.025 Pembekuan atau Pencabutan Sertifikat Bandar Udara

- 1. Direktorat Jenderal Perhubungan Udara dapat memberikan sanksi jika:
 - a. bagian sertifikat dilanggar;
 - b. fasilitas, peralatan, perawatan atau pengoperasian bandar udara tidak memenuhi standar keselamatan penerbangan; atau
 - c. pemegang sertifikat tidak dapat melaksanakan peraturan yang dipersyaratkan dalam Sub Bagian 139 B.2.
- 2. Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam butir 1 berupa:
 - a. pembatasan kemampuan operasional bandar udara; dan
 - b. sanksi administratif, meliputi:
 - 1) peringatan tertulis;
 - 2) pembekuan sertifikat bandar udara;
 - 3) pencabutan sertifikat Bandar udara; dan/atau
 - 4) denda administratif.
- 3. Sebelum pembekuan atau pencabutan sertifikat bandar udara, Direktur Jenderal harus:
 - a. memberikan pemberitahuan kepada pemegang sertifikat perihal:
 - 1) penetapan fakta dan kondisi yang akan menjadi dasar pembekuan atau pencabutan oleh Direktur Jenderal;
 - 2) mengundang secara tertulis kepada pemegang sertifikat untuk menjelaskan alasan agar sertifikat tidak dibekukan atau dicabut; dan

- b. mempertimbangkan segala penjelasan atau keterangan yang diberikan oleh pemegang sertifikat sebagaimana dimaksud pada butir (3a) (ii) untuk diambil keputusan.
4. Selama sertifikat bandar udara dibekukan, penyelenggara bandar udara dilarang mengoperasikan bandar udara.

139.027 Pencabutan Sertifikat Bandar Udara atas Permintaan Penyelenggara Bandar Udara

1. Permohonan pencabutan sertifikat bandar udara harus disampaikan secara tertulis oleh penyelenggara bandar udara kepada Direktur Jenderal selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari sebelum tanggal pencabutan dilakukan.
2. Direktur Jenderal harus mencabut sertifikat sesuai dengan tanggal pencabutan yang diusulkan oleh pemohon.
3. Pencabutan sebagaimana dimaksud pada butir 2, dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. dipublikasikan melalui *NOTAM*; dan
 - b. menghilangkan/menghapus data bandar udara dari AIP Indonesia.

139.029 Sertifikat Bandar Udara Sementara (*Temporary Aerodrome Certificate*)

1. Dalam keadaan tertentu, Direktur Jenderal dapat menerbitkan Sertifikat Bandar Udara Sementara (*Temporary Aerodrome Certificate*) apabila pemohon diyakini dapat dengan baik mengoperasikan dan melakukan perawatan terhadap bandar udara selama masa berlakunya sertifikat sementara.
2. Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada butir (1) antara lain terdiri dari:
 - a. terjadi bencana alam atau keadaan darurat lainnya;
 - b. kegiatan pejabat Pemerintahan; atau
 - c. untuk angkutan udara niaga tidak berjadwal dan angkutan udara bukan niaga.
3. Sertifikat Bandar Udara Sementara (*Temporary Aerodrome Certificate*) diberikan untuk jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari dan dapat diperpanjang hanya 1 (satu) kali.
4. Jika Direktur Jenderal menilai dan memutuskan untuk menerbitkan sertifikat sementara, akan:
 - a. memberitahu pemohon, secara tertulis bahwa bandar udara tersebut telah diterbitkan sertifikat; dan
 - b. menerbitkan/mengumumkan data lengkap bandar udara dalam AIP Indonesia.
5. Ketentuan lebih lanjut mengenai Sertifikat Bandar Udara diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal.

SUB BAGIAN 139 B.2 Kewajiban Penyelenggara Bandar Udara Yang Memiliki Sertifikat Bandar Udara

139.031 Kompetensi Pejabat Organisasi Penyelenggara Bandar Udara

1. Setiap bandar udara yang bersertifikat harus dipimpin oleh seorang kepala bandar udara dan dapat dibantu oleh pejabat yang bertanggung jawab di bidang keselamatan dan keamanan bandar udara yang berkualifikasi dalam manajemen bandar udara untuk memberikan arahan dalam semua masalah pemeliharaan dan operasional guna menjamin keselamatan penerbangan.
2. Penyelenggara Bandar Udara harus mempekerjakan secara *full time* posisi berikut atau setara dengan:
 - a. Kepala Bandar Udara adalah Kepala Unit Penyelenggara Bandar Udara atau Kepala Badan Usaha Bandar Udara;
 - b. Pejabat Bidang Keselamatan Bandar Udara antara lain Direktur/Manager/Kepala Bidang /Junior Manager/Kepala Seksi yang terkait dengan operasi, teknik dan/atau keselamatan adalah pejabat bidang keselamatan penerbangan yang bertanggung jawab untuk melaksanakan kegiatan operasional dan pemeliharaan bandar udara termasuk pelaksanaan Sistem Manajemen Keselamatan Operasi Bandar Udara (*Safety Management System Manual*).
3. Penyelenggara bandar udara dapat membentuk organisasi yang lebih sederhana apabila kegiatan operasi penerbangan tidak berlangsung setiap hari, dengan mempertimbangkan pemenuhan kompetensi setiap personel dalam melaksanakan tugasnya.
4. Nama jabatan yang dipersyaratkan dalam butir 2 pada bagian ini atau nama dan jumlah posisi setara yang disetujui dalam butir 3 pada bagian ini harus tercantum dalam Buku Pedoman Pengoperasian Bandar Udara (*Aerodrome Manual*).
5. Kualifikasi dan tanggung jawab Kepala Bandar Udara dan Pejabat Bidang Keselamatan Bandar Udara adalah sebagai berikut :
 - a. Kualifikasi Kepala Bandar Udara meliputi:
 - 1) pendidikan formal untuk:
 - a) kepala bandar udara internasional dan kepala bandar udara pengumpul dengan skala pelayanan primer, minimal S-1 / D-IV;
 - b) kepala bandar udara pengumpul dengan skala pelayanan sekunder minimal D III;
 - c) kepala bandar udara pengumpul dengan skala pelayanan tersier minimal D II; dan
 - d) kepala bandar udara pengumpan minimal SLTA.
 - 2) pendidikan dan pelatihan yang telah diikuti sekurang-kurangnya meliputi
 - a) kebandarudaraan;
 - b) keudaraan;
 - c) manajemen bandar udara;
 - d) *aviation security (avsec) management*;

- e) *security risk and crisis management* dan
 - f) sistem manajemen keselamatan (*safety management system/SMS*).
- 3) serendah-rendahnya menduduki pangkat 1 (satu) tingkat di bawah jenjang pangkat yang ditentukan bagi kepala bandar udara
- 4) Kompetensi kepala bandar udara meliputi:
- a) pengetahuan sekurang-kurangnya
 - i. memahami peraturan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan;
 - ii. memahami peraturan keselamatan dan keamanan bandar udara khususnya terkait dengan manajemen dan pengoperasian bandar udara;
 - iii. memahami praktek-praktek (*best practices*) dalam pelaksanaan keselamatan dan keamanan penerbangan nasional dan internasional; dan
 - iv. memiliki pengetahuan mengenai kepemimpinan yang efektif.
 - b) keterampilan kepala bandar udara sekurang-kurangnya :
 - i. mampu mengarahkan penyusunan rencana dan program transportasi udara sesuai lingkup tugas dan kewenangannya;
 - ii. mampu mengarahkan penyelenggaraan transportasi udara sesuai rencana dan program yang disusun;
 - iii. mampu mengarahkan pelaksanaan pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan transportasi;
 - iv. mampu memberikan kontribusi bagi pemikiran strategis Direktorat Jenderal Perhubungan Udara;
 - v. mampu berkomunikasi dengan baik, secara lisan maupun tertulis melalui surat-surat resmi;
 - vi. mempunyai kemampuan dan keinginan untuk mencapai hasil yang sudah ditetapkan bagi kemajuan bandar udara;
 - vii. mempunyai integritas yang tinggi agar pengoperasian dan pelayanan bandar udara dapat dilaksanakan dengan baik; dan
 - viii. mampu memotivasi staf untuk saling bekerja sama dengan baik dan meningkatkan kinerja serta disiplin.
- b. Kualifikasi pejabat bidang keselamatan bandar udara meliputi :
- 1) Pendidikan formal untuk
 - a) pejabat bidang keselamatan di bandar udara internasional dan bandar udara pengumpul dengan skala pelayanan primer, minimal D III;
 - b) pejabat bidang keselamatan di bandar udara pengumpul dengan skala pelayanan sekunder, minimal D II; dan
 - c) pejabat bidang keselamatan di bandar udara pengumpul dengan skala pelayanan tersier dan bandar udara pengumpan, minimal SLTA (Umum/SMK).
 - 2) Pendidikan dan pelatihan yang telah diikuti sekurang-kurangnya meliputi:
 - a) kebandarudaraan;
 - b) keudaraan;
 - c) pengoperasian bandar udara (*airport operation*);
 - d) sistem manajemen keselamatan (*safety Management System/SMS*); dan

- e) program penanggulangan keadaan darurat (*Aerodrome Emergency Plan/AEP*).
- 3) Serendah-rendahnya menduduki pangkat 1 (satu) tingkat di bawah jenjang pangkat yang ditentukan, bagi pejabat bidang keselamatan bandar udara.
- 4) Kompetensi pejabat bidang keselamatan bandar udara meliputi :
 - a) pengetahuan sekurang-kurangnya:
 - i. memahami peraturan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan;
 - ii. memahami peraturan perundang-undangan terkait keselamatan operasi bandar udara nasional dan internasional;
 - iii. memahami/mengetahui peraturan/tradisi/kebiasaan yang berlaku di daerah tersebut, yang akan berdampak terhadap keselamatan Bandar udara tersebut; dan memiliki pengetahuan mengenai kepemimpinan yang efektif.
 - b) Keterampilan pejabat bidang keselamatan bandar udara sekurang kurangnya:
 - i. mampu mengkoordinir penyusunan sistem manajemen keselamatan bandar udara;
 - ii. mampu mengkoordinir pelaksanaan keselamatan operasi Bandar udara;
 - iii. mampu mengkoordinir pelaksanaan pengawasan internal dan evaluasi pelaksanaan keselamatan operasi bandar udara; dan
 - iv. mempunyai ketrampilan dalam bekerjasama dan melakukan komunikasi secara efektif dalam lingkup internal dan eksternal.

139.033 Kewajiban Manajemen dalam Penyelenggaraan Bandar Udara

- 1. Dalam melaksanakan tugasnya kepala bandar udara mempunyai tanggung jawab antara lain :
 - a. memastikan keselamatan dan keamanan Bandar udara serta pelaksanaan operasional bandar udara berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - b. memastikan pengoperasian bandar udara sesuai dengan buku pedoman pengoperasian bandar udara (*aerodrome manual*), program keamanan Bandar udara (*airport security programme/ASP*) dan standar operasi prosedur (*standard operating procedure/SOP*) yang telah disetujui/diterima (*accepted*) oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Udara;
 - c. bekerja sama dengan penyelenggara bandar udara dalam satu wilayah tertentu terkait dengan keselamatan dan keamanan bandar udara;
 - d. memimpin, mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan seluruh kegiatan bandar udara;
 - e. mengkaji dan merumuskan kebijakan teknis di bidang perhubungan udara yang berlaku di bandar udara;
 - f. merumuskan rencana dan program kerja bandar udara sebagai pedoman kerja sesuai dengan kebijakan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara;

- g. menyusun, melaporkan dan mempertanggungjawabkan tugas bidang perhubungan udara sesuai dengan bidang tugas baik secara operasional maupun administrasi kepada Direktur Jenderal Perhubungan Udara;
 - h. membagi tugas kepada para Pejabat Bidang Keselamatan Bandar Udara sesuai dengan bidang tugasnya;
 - i. memberi petunjuk kepada Pejabat Bidang Keselamatan Bandar Udara untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
 - j. membina pelaksanaan tugas bidang angkutan, lalu lintas, keselamatan dan teknik sarana, pengendalian dan operasional bandar udara serta kelompok jabatan fungsional;
 - k. menyelenggarakan koordinasi, komunikasi, konsultasi, sosialisasi dan kerjasama di bidang perhubungan udara dengan pemerintah daerah setempat;
 - l. memberi informasi dan saran serta bahan pertimbangan kepada Kepala Daerah atau pihak terkait dalam urusan bidang perhubungan udara sebagai bahan penetapan kebijakan daerah;
 - m. melaksanakan tindak lanjut pengaduan masyarakat terhadap pelayanan dan pengoperasian bandar udara; dan
 - n. menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas/kegiatan bandar udara, sesuai ketentuan yang berlaku
2. Dalam melaksanakan tugasnya pejabat bidang keselamatan bandar udara mempunyai tanggung jawab antara lain:
- a. memastikan operasional keselamatan penerbangan di bandar udara berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - b. mengembangkan dan melaksanakan sistem manajemen keselamatan (*safety management system/SMS*) Bandar udara;
 - c. menyusun program penanggulangan keadaan darurat di bandar udara (*airport emergency plan/AEP*);
 - d. memastikan ketersediaan pelayanan Pertolongan Kecelakaan Penerbangan dan Pemadam Kebakaran (PKP-PK);
 - e. melakukan identifikasi *hazard*, penilaian dan mitigasi risiko; dan
 - f. melakukan pengumpulan data, mendokumentasikan dan melaporkan terhadap kejadian (*incident*), kejadian serius (*serious incident*) dan kecelakaan (*accident*) personel atau petugas dan/atau penumpang, pesawat udara, fasilitas/peralatan dan kendaraan yang terjadi di daerah pergerakan (*movement area*) kepada Direktorat Jenderal Perhubungan Udara.

139.035 Kompetensi Personel Bandar Udara

1. Penyelenggara bandar udara dan penyedia jasa terkait bandar udara wajib mempekerjakan personel bandar udara yang memiliki kemampuan dan kualifikasi yang sesuai dengan bidangnya.
2. Personel bandar udara sebagaimana dimaksud pada butir 1 wajib memiliki sertifikat kompetensi yang diterbitkan oleh lembaga pendidikan dan pelatihan yang telah mendapatkan akreditasi dari Direktorat Jenderal

Perhubungan Udara dan lisensi yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Udara.

3. Personel bandar udara antara lain meliputi:
 - a. personel teknik bandar udara;
 - b. personel elektronika bandar udara;
 - c. personel listrik bandar udara;
 - d. personel mekanikal bandar udara;
 - e. personel pengatur pergerakan pesawat udara (*apron movement control/AMC*);
 - f. personel peralatan pelayanan darat pesawat udara;
 - g. personel pemandu parkir pesawat udara;
 - h. personel pelayanan garbarata;
 - i. personel pengelola dan pemantau lingkungan;
 - j. personel Pertolongan Kecelakaan Penerbangan-Pemadam Kebakaran (PKP-PK);
 - k. personel *salvage*; dan
 - l. personel pelayanan pendaratan helikopter (*helikopter landing officer*).
4. Lisensi personel bandar udara diberikan setelah memenuhi persyaratan:
 - a. administratif;
 - b. kesehatan;
 - c. memiliki sertifikat kompetensi; dan
 - d. lulus ujian.
5. Personel bandar udara yang telah memiliki lisensi wajib:
 - a. mematuhi/memenuhi peraturan keselamatan penerbangan;
 - b. membawa lisensi sewaktu bekerja dan menunjukkan kepada inspektur Direktorat Jenderal Perhubungan Udara jika diminta;
 - c. melaksanakan pekerjaan sesuai dengan ketentuan di bidangnya;
 - d. mempertahankan kemampuan yang dimiliki; dan
 - e. melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala.
6. Personel bandar udara yang melanggar ketentuan dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan;
 - b. pembekuan lisensi;
 - c. pencabutan lisensi; dan/atau
 - d. denda administratif.
7. Lisensi personel bandar udara yang diberikan oleh negara lain dinyatakan sah melalui proses pengesahan atau validasi oleh Direktur Jenderal.
8. Ketentuan lebih lanjut mengenai lisensi personel bandar udara diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal.

139.037 Pendidikan dan/atau Pelatihan bagi Personel Bandar Udara

1. Penyelenggara bandar udara harus menjamin bahwa semua personel bandar udara yang dipekerjakan mendapatkan pendidikan dan/atau pelatihan yang memadai untuk memenuhi standar kompetensi personel bandar udara yang telah ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

2. Pendidikan dan/atau pelatihan personel bandar udara harus dilaksanakan oleh lembaga pendidikan dan/atau pelatihan yang telah diakreditasi atau diberi izin oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Udara.
3. Untuk mendapatkan akreditasi atau izin sebagaimana butir (2), lembaga pendidikan dan/atau pelatihan harus memenuhi persyaratan:
 - a. administrasi, antara lain:
 - 1) surat permohonan;
 - 2) akte pendirian;
 - 3) NPWP;
 - 4) bukti pembayaran pajak (khusus untuk perpanjangan);
 - 5) surat keterangan domisili perusahaan;
 - 6) Surat Izin Usaha Pendidikan dan/atau Pelatihan dari instansi yang berwenang;
 - 7) daftar susunan pengurus perusahaan/struktur organisasi;
 - 8) surat pernyataan yang menyatakan tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak bangkrut, usahanya tidak sedang dihentikan atau tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
 - 9) surat pernyataan kebenaran dokumen.
 - b. substansi, antara lain:
 - 1) kurikulum/silabus pendidikan dan pelatihan sesuai ketentuan yang berlaku;
 - 2) jumlah dan kualifikasi tenaga pengajar (instruktur);
 - 3) fasilitas pendidikan dan pelatihan teori dan praktek;
 - 4) pedoman pelatihan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan; dan
 - 5) buku kerja pendukung dan peraturan.
4. Lembaga pendidikan dan pelatihan yang melanggar ketentuan dalam peraturan 139.037 dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan;
 - b. pembekuan izin lembaga pendidikan dan pelatihan;
 - c. pencabutan izin lembaga pendidikan dan pelatihan; dan/atau
 - d. denda administratif.
5. Ketentuan lebih lanjut mengenai lembaga pendidikan dan pelatihan personel bandar udara diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal.

139.039 Pengoperasian dan Pemeliharaan Bandar Udara

Penyelenggara bandar udara wajib menjamin bandar udara dioperasikan dan dipelihara dengan tingkat ketelitian yang memadai.

139.041 Prosedur Pedoman Pengoperasian Bandar Udara (*Aerodrome Manual Procedure*)

1. Penyelenggara bandar udara wajib mengoperasikan dan melakukan pemeliharaan terhadap bandar udara sesuai dengan prosedur pengoperasian bandar udara termasuk prosedur untuk mencegah *runway excursion* dan *incursion*, kecuali ada ketentuan lain yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal.

2. Penyelenggara bandar udara harus membuat *Letter of Agreement (LOA)* atau sejenisnya dengan Unit Pelayanan Informasi Aeronautika di unit ATS bandar udara masing-masing atau di unit ATS bandar udara yang melayaninya untuk memastikan mekanisme dan koordinasi penerbitan *NOTAM*.
3. Direktur Jenderal dapat menginstruksikan penyelenggara bandar udara untuk mengubah prosedur yang telah ditetapkan dalam Pedoman Pengoperasian Bandar Udara, apabila diperlukan untuk kepentingan keselamatan pengoperasian pesawat udara.

139.043 Pemberitahuan tentang Penyimpangan

1. Penyimpangan terhadap prosedur dan fasilitas, termasuk *Runway End Safety Area (RESA)* maupun *runway strip*, dalam Pedoman Pengoperasian Bandar Udara dapat dilakukan oleh penyelenggara bandar udara bersertifikat setelah melakukan *risk assessment* dan upaya mengurangi dampak (*risk mitigation*) yang telah mendapat persetujuan Direktur Jenderal.
2. Penyelenggara bandar udara wajib melaporkan secara tertulis kepada Direktur Jenderal apabila terdapat penyimpangan Pedoman Pengoperasian Bandar Udara dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah penyimpangan dilakukan.

139.045 Marka Bandar Udara (*Aerodrome Marking*)

1. Penyelenggara bandar udara harus memberi marka sesuai dengan Standar Teknis dan Operasi (*Manual of Standard/MOS*) Bagian 139 Volume I Bandar Udara (*Aerodrome*) pada:
 - a. daerah pergerakan;
 - b. setiap *unserviceable area*; dan
 - c. setiap *work area* pada atau dekat daerah pergerakan.
2. Penyelenggara bandar udara harus menjamin bahwa semua marka bandar udara dirawat sesuai dengan Standar Teknis dan Operasi (*Manual of Standard/MOS*) Bagian 139 Volume I Bandar Udara (*Aerodrome*).

139.047 Indikator Arah Angin Secara Umum

Penyelenggara bandar udara bersertifikat harus memasang dan merawat indikator arah angin sekurang-kurangnya 1 (satu) unit pada bandar udara, sesuai dengan Standar Teknis dan Operasi (*Manual of Standard/MOS*) Bagian 139 Volume I Bandar Udara (*Aerodrome*).

139.049 Indikator Arah Angin untuk Persyaratan pada *Runway* Tertentu

Penyelenggara bandar udara bersertifikat wajib memasang dan memelihara setidaknya satu indikator arah angin dan atau mensyaratkan tambahan indikator arah angin untuk dilengkapi di bandar udara.

139.051 Sistem Indikator Kemiringan *Approach Visual (Visual Approach Slope Indicator System)*

1. Penyelenggara bandar udara bersertifikat harus memasang Sistem Indikator Kemiringan *Approach Visual (Visual Approach Slope Indicator System)* di ujung *runway* sesuai dengan Standar Teknis dan Operasi (*Manual of Standard/MOS*) Bagian 139 Volume I Bandar Udara (*Aerodrome*), apabila ujung *runway* tersebut secara rutin (*regular*) digunakan sebagai *approach runway* untuk jenis pesawat *jet/turbo propeller*.
2. Apabila dipandang perlu, untuk kepentingan keselamatan navigasi penerbangan, Direktur Jenderal dapat menginstruksikan kepada penyelenggara bandar udara untuk memasang *visual approach slope indicator system* yang diakui (*approved*) pada ujung *runway* atau akhir pendekatan dalam butir 1 tidak diterapkan.

139.053 Sistem Penerangan pada Daerah Pergerakan

1. Bandar udara bersertifikat yang digunakan untuk pendaratan dan lepas landas pada malam hari atau pada kondisi kurang dari kondisi meteorologi visual (*visual meteorological condition*) di siang hari, penyelenggara bandar udara harus menyediakan dan mempertahankan sistem penerangan pada daerah pergerakan dan tercantum pada ketentuan butir 2 dan butir 3.
2. Sistem penerangan meliputi:
 - a. penerangan *runway, taxiway, dan apron* yang digunakan pada malam hari atau kondisi kurang dari *Visual Meteorological Condition* di siang hari;
 - b. penerangan minimal pada 1 (satu) indikator arah angin;
 - c. penerangan pada *obstacle* di sekitar daerah pergerakan; dan
 - d. jika bandar udara digunakan untuk operasi *precision approach category I, II, III* – penerangan untuk *approach, runway, dan taxiway*.
3. Sistem penerangan pada bandar udara bersertifikat harus:
 - a. memenuhi Standar Teknis dan Operasi (*Manual of Standard/MOS*) Bagian 139 Volume I Bandar Udara (*Aerodrome*); atau
 - b. yang disetujui Direktur Jenderal.

139.055 Pemeriksaan Sistem Penerangan

1. Penyelenggara bandar udara bersertifikat dilarang mengoperasikan sistem penerangan (*lighting system*) instalasi baru sebelum mendapat persetujuan dari Direktur Jenderal berdasarkan pemenuhan hasil pemeriksaan yaitu:
 - a. pemeriksaan oleh personel fasilitas listrik bandar udara yang menyatakan telah memenuhi spesifikasi yang disebutkan dalam Standar Teknis dan Operasi (*Manual of Standard/MOS*) Bagian 139 Volume I Bandar Udara (*Aerodrome*); dan
 - b. pemeriksaan sistem penerangan dengan kalibrasi (*flight check*).
2. Jenis sistem penerangan (*lighting system*) pada butir 1 meliputi:
 - a. *approach lighting system*;
 - b. *runway lighting system* untuk *instrument approach runway*; dan

- c. *visual approach slope indicator system* untuk pesawat udara *jet/turbo propeller* sistem lain yang dimaksudkan untuk penggunaan sementara dengan periode tidak lebih dari 30 hari.
3. Penyelenggara bandar udara bersertifikat wajib melakukan pemeriksaan terhadap penerangan non-aeronautika (*non-aeronautical ground light*) di sekitar bandar udara yang dapat membahayakan keselamatan pengoperasian pesawat udara (Misal : laser emitter, konfigurasi lampu jalan yang dapat membingungkan pilot atau menyerupai konfigurasi sistem penerangan bandar udara).
4. Apabila terdapat penerangan non-aeronautika (*non-aeronautical ground light*) sebagaimana butir 3, penyelenggara bandar udara wajib berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk menghilangkan atau menutup atau memadamkan penerangan dimaksud.

139.057 *Airport Emergency Plan*

1. Penyelenggara bandar udara wajib menyiapkan Dokumen Rencana Penanggulangan Keadaan Darurat Bandar Udara (*Airport Emergency Plan*).
2. Dokumen *Airport Emergency Plan* harus memuat tentang:
 - a. prosedur koordinasi atas tindakan penanggulangan keadaan darurat di bandar udara dan sekitarnya;
 - b. prosedur koordinasi antar semua organisasi/unit kerja yang terkait dengan pelayanan keadaan darurat; dan
 - c. hal-hal yang dipersyaratkan Standar Teknis dan Operasi (*Manual of Standard/MOS*) Bagian 139 untuk dicantumkan dalam *Airport Emergency Plan*.
3. Komite Penanggulangan Keadaan Darurat Bandar Udara harus meninjau kembali Dokumen *Airport Emergency Plan* sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun dan membuat perubahan yang diperlukan untuk menjamin bahwa Dokumen *Airport Emergency Plan* dapat berjalan dengan baik.
4. Peninjauan terhadap Dokumen *Airport Emergency Plan* harus berkonsultasi dengan organisasi/unit kerja yang terkait.
5. Setelah keadaan darurat terjadi atau setelah latihan penanggulangan keadaan darurat dilaksanakan, penyelenggara bandar udara harus mengupayakan agar Komite Penanggulangan Keadaan Darurat Bandar Udara melakukan hal-hal sebagai berikut:
 - a. peninjauan ulang efektifitas langkah-langkah atau tindakan-tindakan (*respon*) terhadap keadaan darurat di bandar udara dan disekitarnya; dan
 - b. penilaian terhadap Dokumen *Airport Emergency Plan* dianggap sudah memadai untuk menanggulangi keadaan darurat di bandar udara apabila telah diambil langkah-langkah korektif yang diperlukan untuk menjamin agar *Dokumen Airport Emergency Plan* dapat dengan baik diimplementasikan.
6. Penyelenggara bandar udara harus menjamin:
 - a. Dokumen *Airport Emergency Plan* dalam kondisi terkini;
 - b. catatan setiap peninjauan ulang terhadap Dokumen *Airport Emergency Plan* harus dibuat; dan

- c. setiap catatan sebagaimana dimaksud huruf a, harus disimpan sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun setelah peninjauan ulang terkait dilakukan.
7. Dokumen *Airport Emergency Plan* wajib memasukkan sumber daya dan koordinasi kepada unit / instansi pelayanan penyelamatan khusus yang siap untuk membantu melakukan penanganan keadaan darurat ke dalam dokumen AEP untuk bandar udara yang terletak di dekat perairan dan/atau rawa-rawa serta untuk bandar udara dimana terdapat bagian besar daerah pendaratan dan lepas landas pada daerah tersebut.

139.059 Komite Penanggulangan Keadaan Darurat Bandar Udara

1. Penyelenggara bandar udara wajib membentuk Komite Penanggulangan Keadaan Darurat Bandar Udara.
2. Komite Penanggulangan Keadaan Darurat Bandar Udara, terdiri dari:
 - a. perwakilan unit/instansi yang berada di wilayah bandar udara; dan
 - b. perwakilan unit/instansi yang berada di sekitar wilayah bandar udara.

139.061 Pengujian Terhadap *Airport Emergency Plan*

1. Penyelenggara bandar udara wajib melakukan pengujian terhadap rencana penanggulangan keadaan darurat untuk:
 - a. menguji koordinasi, komunikasi, dan komando antara organisasi/unit kerja terkait dengan mengacu pada dokumen *Airport Emergency Plan*;
 - b. memadainya personel, prosedur, dan fasilitas yang disiapkan untuk keadaan darurat; dan
 - c. mengevaluasi hasil latihan dalam rangka meningkatkan efektivitas penanggulangan keadaan darurat bandar udara (*Airport Emergency Plan*).
2. Pengujian rencana penanggulangan keadaan darurat bandar udara dilakukan dengan:
 - a. latihan penanggulangan keadaan darurat skala penuh (*full scale exercise*) secara rutin setiap 2 (dua) tahun dan melaksanakan latihan penanggulangan keadaan darurat parsial pada tahun diantaranya; atau
 - b. melaksanakan serangkaian modul-modul latihan dan diakhiri dengan latihan penanggulangan keadaan darurat skala penuh (*full scale exercise*) pada tahun ke-3 (tiga) kemudian dilakukan tinjauan setelahnya; dan
 - c. setelah penanganan keadaan darurat dilakukan tinjauan dengan tujuan menemukan kekurangan dan melakukan perbaikan dalam penanganan keadaan darurat.
3. Jika terjadi keadaan darurat dalam kurun waktu 6 (enam) bulan sebelum pelatihan penanggulangan keadaan darurat skala penuh dilakukan, maka penyelenggara bandar udara dapat mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal untuk memperpanjang jangka waktu atau menunda pelaksanaan latihan penanggulangan keadaan darurat skala penuh berikutnya.

4. Direktur Jenderal dapat menyetujui permohonan apabila:
 - a. semua organisasi/unit kerja terkait memberikan respon yang sesuai dengan dokumen rencana penanggulangan keadaan darurat (*Airport Emergency Plan Document*); dan
 - b. dokumen *Airport Emergency Plan* telah diimplementasikan dengan baik dalam mengatasi keadaan darurat.
5. Direktur Jenderal dapat memperpanjang periode waktu untuk latihan skala penuh sampai dengan 2 (dua) tahun setelah keadaan darurat terjadi.
6. *Airport Emergency Plan* wajib memperhatikan prinsip-prinsip faktor kemanusiaan (*human factor principles*) untuk memastikan respon optimal dari semua pihak terkait.
7. Ketentuan lebih lanjut mengenai *Airport Emergency Plan* diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal.

139.063 Sistem Manajemen Keselamatan Bandar Udara (*Safety Management System*)

1. Setiap penyelenggara bandar udara bersertifikat wajib memiliki dan melaksanakan Sistem Manajemen Keselamatan Bandar Udara yang minimal meliputi:
 - a. kebijakan dan sasaran keselamatan, termasuk penetapan *safety indicator* dan *safety target*;
 - b. manajemen resiko keselamatan;
 - c. jaminan keselamatan; dan
 - d. promosi keselamatan.
2. Sistem Manajemen Keselamatan Bandar Udara (*Safety Management System*) harus mengacu pada pedoman pelaksanaan Sistem Manajemen Keselamatan (*Safety Management System*) yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal.
3. Sistem Manajemen Keselamatan Bandar Udara (*Safety Management System*) sebagaimana dimaksud pada butir 1 mengatur pula kewajiban semua pengguna bandar udara, termasuk mereka yang melakukan kegiatan secara independen di bandar udara (khusus terkait dengan penerbangan atau *aircraft ground handling*), untuk bekerja sama dalam program peningkatan keselamatan, pemenuhan ketentuan keselamatan, dan ketentuan yang mewajibkan segera melaporkan apabila terjadi suatu kecelakaan (*accident*), kejadian (*incident*) atau *hazard* yang mempengaruhi keselamatan.
4. Penyelenggara bandar udara dalam setiap rencana perubahan fasilitas dan prosedur yang ada, wajib melaksanakan *risk assessment* dan upaya mengurangi/mitigasi dampak hingga memenuhi prinsip *ALARPs (As Low As Reasonably Practicables)* sebelum rencana tersebut dilaksanakan.
5. Ketentuan lebih lanjut mengenai Sistem Manajemen Keselamatan Bandar Udara (*Safety Manajemen System*) diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal.

139.065 Inspeksi Kelayakan Operasi Bandar Udara (*Airport Serviceability Inspections*)

1. Penyelenggara bandar udara harus menjamin inspeksi kelayakan operasi bandar udara (*airport serviceability inspections*) dilaksanakan sesuai dengan Standar Teknis dan Operasi (*Manual of Standard/MOS*) Bagian 139 Volume I Bandar Udara (*Aerodrome*).
2. Inspeksi kelayakan operasi bandar udara (*airport serviceability inspections*) merupakan suatu inspeksi yang dilakukan terhadap bandar udara untuk memastikan bahwa bandar udara yang bersangkutan telah memenuhi ketentuan keselamatan untuk pengoperasian pesawat udara.
3. Inspeksi kelayakan operasi bandar udara (*airport serviceability inspections*) harus dilaksanakan:
 - a. sebelum dan sesudah, dan jika diperlukan didalam jam operasi;
 - b. setelah terjadi badai, angin ribut atau cuaca buruk lainnya;
 - c. apabila personel pelayanan lalu lintas penerbangan atau Direktur Jenderal menghendaki dilakukan inspeksi; dan
 - d. segera mungkin setelah terjadinya kecelakaan (*accident*) atau kejadian (*incident*) pesawat udara di bandar udara.

139.067 *Internal Safety Audit* oleh Penyelenggara Bandar Udara

1. Penyelenggara bandar udara yang telah mempunyai *safety management system* dalam pengoperasiannya, wajib mengadakan audit terhadap *safety management system* bandar udara, yang termasuk inspeksi terhadap fasilitas dan peralatan, prosedur operasi dan personel bandar udara. Audit ini mencakup tanggung jawab penyelenggara bandar udara dan memberikan penilaian terhadap:
 - a. informasi yang dipublikasikan dalam AIP adalah informasi yang terbaru dan akurat; dan
 - b. relevansi, validitas, dan akurasi dari prosedur operasi (*standard operating procedure*) dalam Pedoman Pengoperasian Bandar Udara.
2. Pelaksanaan audit wajib dilaksanakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun terkecuali diperintahkan langsung oleh Direktur Jenderal.
3. Audit yang dilaksanakan wajib memenuhi semua peraturan berlaku yang terdapat pada Pedoman Pengoperasian Bandar Udara.
4. Penyelenggara bandar udara harus memastikan bahwa yang melaksanakan audit adalah personel yang mempunyai kemampuan teknis operasional dan pengalaman dalam melaksanakan setiap audit dan inspeksi bandar udara.
5. Penyelenggara bandar udara wajib memastikan bahwa laporan audit atau inspeksi disiapkan dan ditandatangani oleh personel yang melakukan audit atau inspeksi.

139.069 Badan Hukum Indonesia Yang Bergerak di Kegiatan Penunjang Bandar Udara

1. Badan Hukum Indonesia yang bergerak di kegiatan penunjang bandar udara adalah badan hukum Indonesia yang melaksanakan kegiatan pelayanan jasa kegiatan penunjang bandar udara yang meliputi pelayanan jasa penunjang kegiatan penerbangan dan/atau pelayanan jasa penunjang kegiatan bandar udara.
2. Penyelenggara bandar udara wajib melakukan audit dan/atau inspeksi terhadap semua badan hukum Indonesia yang melakukan kegiatan penunjang bandar udara untuk memastikan pemenuhan persyaratan keselamatan penerbangan sebagai bagian dalam pelaksanaan *Safety Management System (SMS)*.
3. Hasil laporan audit atau inspeksi tersebut disampaikan ke Direktur Jenderal.

139.071 Perencanaan dan Pelaksanaan Pekerjaan-Pekerjaan Bandar Udara

1. Penyelenggara bandar udara harus memastikan bahwa semua pekerjaan-pekerjaan bandar udara yang dilaksanakan telah dilakukan *risk assessment* dan *risk mitigation* serta diumumkan sehingga tidak menimbulkan bahaya untuk pengoperasian pesawat udara atau membingungkan penerbang.
2. Penyelenggara bandar udara harus memenuhi ketentuan dalam Standar Teknis dan Operasi (*Manual of Standard/MOS*) Bagian 139 yang berkaitan dengan perencanaan dan persyaratan sebelum pekerjaan-pekerjaan bandar udara tersebut diumumkan.

139.073 Program Pemeliharaan Perkerasan (*Pavement*) dan Alat Bantu Visual

1. Penyelenggara bandar udara harus membuat dan melaksanakan Program Pemeliharaan Perkerasan (*Pavement Management System*) dan Program Pemeliharaan Alat Bantu Visual.
2. Program Pemeliharaan Perkerasan (*Pavement Management System*) dan Program Pemeliharaan Alat Bantu Visual harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Standar Teknis dan Operasi MOS 139 dan disampaikan hasilnya kepada Direktur Jenderal sedikitnya sekali dalam setahun.
3. Program Pemeliharaan Perkerasan (*Pavement Management System*) merupakan prosedur sistematis untuk mengetahui perencanaan pemeliharaan (kapan dan bagaimana) untuk memperoleh hasil yang maksimal dengan biaya yang seefisien mungkin, termasuk tindakan pencegahan adanya FOD (*foreign object damage/debris*) maupun ketidakraturan permukaan pada *runway*, *taxiway*, *apron* dan *taxiway shoulder*.

4. Program Pemeliharaan Alat Bantu Visual merupakan prosedur sistematis untuk mengetahui perencanaan pemeliharaan (kapan dan bagaimana) untuk menjamin keandalan operasional peralatan/fasilitas dan mencegah terjadinya kegagalan operasi alat bantu visual, termasuk penentuan tujuan setiap tingkatan pemeliharaan.
5. Apabila terdapat hasil dari program tersebut di atas yang menunjukkan penurunan kelayakan sehingga dapat mengakibatkan penurunan kemampuan operasi bandar udara, maka penyelenggara bandar udara harus dapat membuat *risk assessment* guna menjamin keselamatan operasi pesawat udara.
6. Ketentuan lebih lanjut mengenai program pemeliharaan perkerasan (*Pavement Management System*) dan alat bantu visual diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal.

139.075 Manajemen Bahaya Hewan Liar (*Wildlife Hazard Management*) dan Lingkungan

1. Penyelenggara bandar udara harus memastikan fasilitas dan penggunaan lahan yang ada di dalam bandar udara beserta pengembangannya tidak menjadi daya tarik keberadaan burung-burung atau hewan liar.
2. Penyelenggara bandar udara harus berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah/ instansi terkait untuk:
 - 1) memastikan fasilitas dan penggunaan lahan yang ada di sekitar bandar udara beserta pengembangannya tidak menjadi daya tarik keberadaan burung-burung dan hewan liar;
 - 2) membuat program pengelolaan keselamatan operasi bandar udara (*safety plan*) apabila terdapat keadaan lingkungan di sekitar bandar udara yang dapat membahayakan operasional pesawat udara (*hazard*).
3. Penyelenggara bandar udara harus membuat program sebagai upaya untuk mencegah dan meniadakan *hazard* keberadaan burung-burung dan hewan liar di dalam dan sekitar bandar udara (*wildlife hazard management*), termasuk mitigasi peningkatan atau potensi peningkatan adanya serangan burung atau hewan liar akibat pengembangan penggunaan lahan.
4. Program terkait manajemen bahaya hewan liar (*wildlife hazard management*) harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Standar Teknis dan Operasi (*Manual of Standard/MOS*) Bagian 139 dan disampaikan kepada Direktur Jenderal.
5. Penyelenggara bandar udara harus mencatat dan melaporkan setiap kejadian/kecelakaan (*incident/accident*) pesawat udara akibat gangguan burung kepada Direktorat Jenderal Perhubungan Udara untuk disampaikan ke ICAO *Bird Strike Information System* (IBIS).

139.077 Pemberitahuan dan Pelaporan

1. Penyelenggara bandar udara harus melaporkan kepada Direktur Jenderal serta memberitahukan kepada personel pelayanan lalu lintas penerbangan (*air traffic control*) dan/atau pilot mengenai bagian-bagian spesifik dalam butir (2) sampai (6). Batasan waktu pelaporan harus dipenuhi.

2. Penyelenggara bandar udara wajib memberitahukan kepada personel pelayanan lalu lintas penerbangan (*air traffic control*) dan melaporkan kepada Direktur Jenderal selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sebelum dilakukan perubahan atau pembatasan, mengenai perubahan yang terjadi pada kondisi fisik bandar udara yang direncanakan baik bersifat sementara atau tetap yang dapat mempengaruhi keselamatan pesawat udara. Rencana perubahan fisik bandar udara harus disertai kajian keselamatan atau *risk assessment* dan *risk mitigation*.
3. Untuk mempertahankan akurasi informasi mengenai bandar udara yang dipublikasikan dalam AIP, penyelenggara bandar udara wajib menyampaikan secara tertulis kepada AIS secepatnya setiap perubahan data dan informasi bandar udara setelah mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Direktur Jenderal untuk memastikan keakuratan dan pemenuhan persyaratan data integritas aeronautika.
4. Penyelenggara bandar udara bersertifikat wajib mengklarifikasi AIP yang sudah dipublikasi oleh AIS.
5. Penyelenggara bandar udara harus membuat *Letter Of Agreement* (LOA) atau sejenisnya dengan unit pelayanan informasi aeronautika di unit ATS bandar udara masing – masing untuk memastikan mekanisme dan koordinasi penerbitan NOTAM.
6. Penyelenggara bandar udara wajib memastikan secepatnya pengumuman yang diberikan oleh personel pelayanan lalu lintas penerbangan (*air traffic control*) mengikuti aturan yang diketahui oleh penyelenggara bandar udara, seperti:
 - a. semua objek (benda) yang ketinggiannya melewati *obstacle limitation surface* bandar udara;
 - b. keberadaan benda-benda penghalang, keadaan yang membahayakan atau setiap peristiwa di atau dekat bandar udara yang bisa mempengaruhi keselamatan penerbangan;
 - c. setiap penurunan tingkat pelayanan bandar udara dari tingkat yang dipublikasikan dalam AIP atau AIS *Publication*; dan
 - d. setiap penutupan suatu bagian dari daerah manuver di bandar udara.
7. Apabila bandar udara bersangkutan bukan merupakan bandar udara yang ruang udaranya dikendalikan (*controlled airport*), maka pemberitahuan harus disampaikan juga kepada personel pelayanan lalu lintas penerbangan (*air traffic control*) unit bandar udara terdekat.
8. Jika tidak memungkinkan pemberitahuan informasi dilakukan secepatnya, maka penyelenggara bandar udara harus memberitahukan secepatnya pada penerbang yang berkaitan dengan informasi tersebut.

139.079 Pencegahan Terjadinya *Runway Incursion*

Untuk mencegah terjadinya *runway incursion* penyelenggara bandar udara wajib:

1. mempunyai personel atau organisasi yang bertanggung jawab terhadap pencegahan kejadian di *runway* (*runway incursion*);

2. memastikan seluruh fasilitas *aerodrome* mempunyai bentuk fisik yang membantu mengurangi kesalahan masuk ke arah *runway* oleh pengguna yaitu pilot dan pengemudi kendaraan sisi udara;
3. mengimplementasikan *safety management system* untuk memastikan terjaminnya keselamatan di *runway* (*runway safety*);
4. memastikan bahwa *sign*, *marking*, dan *lighting* terpelihara dan dapat terlihat jelas, mencukupi dan tidak menimbulkan keraguan dalam semua kondisi operasional sesuai dengan Standar Teknis dan Operasi (*Manual of Standard/MOS*) Bagian 139;
5. memastikan bahwa informasi daerah kerja sementara (*temporary work areas*) selama masa konstruksi maupun pemeliharaan telah cukup disebarakan kepada pihak terkait dan *sign* maupun *marking* sementara dapat terlihat, memenuhi persyaratan dan tidak menimbulkan keraguan pada semua kondisi operasi;
6. mengadakan pelatihan formal pengemudi dan program penilaiannya (*assessment programme*);
7. mengadakan pelatihan formal pelatihan komunikasi dan penilaiannya untuk pengemudi maupun personel yang bekerja di dalam maupun di sekitar *runway*;
8. menyediakan pelatihan bersama dan pengenalan *aerodrome* untuk pilot, pengatur lalu lintas udara dan pengemudi kendaraan sisi udara untuk meningkatkan pemahaman terhadap peran dan kesulitan yang dihadapi dari personel yang bekerja di bagian terkait lainnya; dan
9. memastikan setiap kejadian di *runway* (*runway incursion*) dilaporkan dan diinvestigasi secara rinci untuk mengidentifikasi penyebab (*causal*) spesifik dan faktor penyumbang kejadian (*contributory factors*) lainnya.

139.081 Runway Safety

1. Untuk meningkatkan keselamatan operasi bandar udara, maka:
 - a. penyelenggara bandar udara bersertifikat dengan hierarki bandar udara pengumpul primer, sekunder dan berstatus internasional wajib membentuk *Runway Safety Team*;
 - b. para penyelenggara bandar udara bersertifikat dengan hierarki pengumpul tersier agar membentuk *Runway Safety Team*; dan
 - c. penyelenggara bandar udara bersertifikat dengan hierarki pengumpulan dan bandar udara beregister dihimbau agar membentuk *Runway Safety Team* sesuai kapasitas organisasi penyelenggara bandar udara dan perkembangan lalu lintas udara yang ada pada bandar udara masing-masing.
2. Tujuan dari *Runway Safety Team* sebagaimana butir 1 di atas antara lain:
 - a. meningkatkan pelaksanaan identifikasi, konsolidasi dan analisis *hazard* secara bersama-sama antara penyelenggara bandar udara dan para *stakeholder*;
 - b. meningkatkan perencanaan, inspeksi dan evaluasi tindakan terhadap keselamatan operasi penerbangan di bandar udara;
 - c. mendapatkan solusi pencegahan terjadinya *runway incursion*, *excursion* dan *confusion* secara komprehensif dan optimal sesuai standar dan “*best practices*” yang ada, baik nasional maupun internasional; dan
 - d. meningkatkan promosi dan pelaksanaan solusi pencegahan peristiwa keselamatan yang terbukti dan mendukung “*best practices*”.

3. Ruang Lingkup Tugas dan Fungsi dari *Runway Safety Team* antara lain:
 - a. menyusun *Runway Safety Program* sebagai acuan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi *Runway Safety Team* dalam rangka meningkatkan tingkat keselamatan penerbangan di daerah pergerakan bandar udara;
 - b. melakukan identifikasi *hazard* dan *risk* analisis terhadap titik-titik pada area pergerakan bandara yang berpotensi menimbulkan resiko kecelakaan penerbangan tinggi (*hot spot*);
 - c. melakukan analisis untuk menemukan *risk* mitigasi terhadap *hot spot - hot spot* tersebut pada huruf b secara efektif dan efisien;
 - d. melakukan penilaian kebutuhan dan efektivitas dari *aerodrome information marking*;
 - e. menyusun dan memberikan saran/rekomendasi kepada Kepala Bandar Udara dan para pimpinan *stakeholder* terkait;
 - f. melaksanakan rekomendasi *Runway Safety Team* Direktorat Jenderal Perhubungan Udara dalam rangka peningkatan tingkat keselamatan penerbangan di daerah pergerakan bandar udara guna mengurangi jumlah dan skala dampak peristiwa keselamatan penerbangan;
 - g. melakukan pertemuan secara berkala dalam rangka mengevaluasi meningkatkan kinerja Tim; dan
 - h. menyusun dan menyampaikan laporan secara berkala terhadap hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bandar Udara guna masukan dan tindak lanjut peningkatan keselamatan di daerah pergerakan bandar udara.
4. Susunan Keanggotaan *Runway Safety Team* sebagaimana dimaksud butir 1 meliputi perwakilan dari pihak:
 - a. Penyelenggara Bandar Udara; sebagai koordinator atau Ketua Tim.
 - b. *Air Traffic Services (ATS)*; sebagai anggota Tim.
 - c. Operator Penerbangan (*Airlines*); sebagai Anggota Tim.Susunan keanggotaan dapat ditambah dan disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi masing-masing bandar udara.
5. Guna kelancaran pelaksanaan fungsi dan tanggung jawab *Runway Safety Team*, setiap penyelenggara bandar udara agar menyediakan sumber dana yang memadai bagi pelaksanaan tugas dan fungsi *Runway Safety Team* dan dalam rangka meningkatkan kompetensi Sumber Daya Manusia di bidang keselamatan penerbangan.
6. Pembentukan *Runway Safety Team* dan pelaksanaan *Runway Safety Program* tidak mengurangi kewajiban penyelenggara bandar udara bersertifikat termasuk pelaksanaan *Safety Management System (SMS)*, namun harus mampu mendukung pengembangan pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggara bandar udara dan para *stakeholder* yang saling melengkapi, integral dan harmonis.

SUB BAGIAN 139 C REGISTER BANDAR UDARA

139.083 Persyaratan untuk Register Bandar Udara

1. Penyelenggara bandar udara dilarang mengoperasikan bandar udara yang tidak memiliki register bandar udara.

2. Register sebagaimana dimaksud pada butir 1 adalah :
 - a. Register Bandar Udara;
 - b. Register Khusus Bandar Udara non penumpang;
 - c. Register *Heliport* ; dan
 - d. Register Bandar Udara Perairan (*Water Aerodrome*).
3. Bandar udara wajib memiliki register bandar udara sebagaimana dimaksud pada butir 2 huruf a, bilamana mempunyai *runway* yang melayani pesawat udara yang memiliki kapasitas maksimum 30 (tiga puluh) tempat duduk untuk angkutan udara niaga dan angkutan udara bukan niaga.
4. Bandar udara wajib memiliki register bandar udara sebagaimana dimaksud pada butir 2 huruf b, bilamana digunakan antara lain untuk kegiatan pemupukan, perikanan, dan kehutanan.

139.085 Permohonan Register Bandar Udara

1. Permohonan register bandar udara diajukan secara tertulis oleh penyelenggara bandar udara kepada Direktur Jenderal.
2. Permohonan register harus dilengkapi dengan isian format yang telah disediakan oleh Direktur Jenderal sebagaimana pada Appendix 3.
3. Permohonan register bandar udara harus melampirkan salinan:
 - a. Buku Pedoman Pengoperasian Bandar Udara (*Aerodrome Manual*) untuk bandar udara sebagaimana pada Appendix 2A;
 - b. Buku Pedoman Pengoperasian Tempat Pendaratan dan Lepas Landas Helikopter (*Heliport Manual*) untuk tempat pendaratan dan lepas landas helikopter sebagaimana pada Appendix 2B; atau
 - c. Buku Pedoman Pengoperasian Bandar Udara perairan (*Water Aerodrome Manual*) untuk bandar udara perairan sebagaimana pada Appendix 2C.

139.087 Pemberian Register Bandar Udara

1. Direktur Jenderal akan menerbitkan register bandar udara apabila:
 - a. tersedia fasilitas dan peralatan sesuai dengan :
 - 1) Standar Teknis dan Operasi (*Manual of Standard/MOS*) Bagian 139 Volume I untuk Bandar Udara (*Aerodrome*);
 - 2) Standar Teknis dan Operasi (*Manual of Standard/MOS*) Bagian 139 Volume II untuk Tempat Pendaratan dan Lepas Landas Helikopter (*Heliport*); atau
 - 3) Standar Teknis dan Operasi (*Manual of Standard/MOS*) Bagian 139 Volume III untuk Bandar Udara Perairan (*Water Aerodrome*).
 - b. tersedia fasilitas Pertolongan Kecelakaan Penerbangan dan Pemadam Kebakaran (PKP-PK) sesuai dengan Standar Teknis dan Operasi (*Manual of Standard/MOS*) Bagian 139 Volume IV;
 - c. tersedia prosedur pengoperasian untuk bandar udara atau *heliport* atau bandar udara perairan untuk menjamin keselamatan operasi pesawat udara;
 - d. tersedia:
 - 1) Buku Pedoman Pengoperasian Bandar Udara (*Aerodrome Manual*) beregister yang memuat semua informasi tentang bandar udara dan sesuai dengan persyaratan pada peraturan sub bagian 139 D.2;

- 2) Buku Pedoman Pengoperasian Tempat Pendaratan dan Lepas Landas Helikopter (*Heliport Manual*) yang memuat semua informasi tentang tempat pendaratan dan lepas landas helikopter sesuai dengan persyaratan pada peraturan sub bagian 139 D.3; atau
 - 3) Buku Pedoman Pengoperasian Bandar Udara Perairan (*Water Aerodrome Manual*) yang memuat semua informasi tentang bandar udara perairan sesuai dengan persyaratan pada peraturan sub bagian 139 D.4.
2. Apabila Direktur Jenderal menerima permohonan dan menerbitkan register bandar udara maka akan :
- a. memberi tahu secara tertulis bahwa bandar udara, *heliport* atau *water aerodrome* tersebut telah beregister; dan
 - b. nempublikasikan dalam AIP Indonesia, data, informasi dan registrasi pada bandar udara, *heliport* atau *water aerodrome*.

139.089 Penolakan Permohonan Register Bandar Udara

Apabila Direktur Jenderal menolak penerbitan register bandar udara maka Direktur Jenderal harus memberikan pemberitahuan tertulis beserta alasannya kepada pemohon, selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah dinyatakan ditolak.

139.091 Data dan Informasi Register Bandar Udara

Register bandar udara harus memuat data dan informasi sekurang-kurangnya:

- a. nama bandar udara;
- b. lokasi bandar udara;
- c. status dan penggunaan;
- d. *Aerodrome Reference Point (ARP)*;
- e. penyelenggara bandar udara;
- f. dimensi *runway*;
- g. *Aerodrome Reference Code (ARC)*;
- h. tipe *runway*;
- i. pesawat udara kritikal yang beroperasi;
- j. kategori PKP-PK;
- k. kondisi operasi tertentu terhadap pelayanan pesawat udara kritikal, jika tersedia;
- l. pembatasan operasi pada bandar udara, jika ada;
- m. penyimpangan yang diizinkan (*authorized deviation*), jika ada; dan
- n. pengecualian (*exemption*).

139.093 Data dan Informasi Tempat Pendaratan dan Lepas Landas Helikopter (*Heliport*)

Register Tempat Pendaratan dan Lepas Landas Helikopter (*Heliport*) harus memuat data dan informasi sekurang-kurangnya:

- a. nama *Heliport*;
- b. tipe *Heliport*;
- c. lokasi *Heliport*;
- d. status dan operasi;
- e. penyelenggara *Heliport*;

- f. karakteristik fisik;
- g. *obstacle restriction*;
- h. alat bantu visual;
- i. kategori PKP-PK;
- j. tipe *helikopter* terkritis;
- k. kondisi operasi tertentu terhadap pelayanan pesawat udara kritikal, jika tersedia; dan
- l. penyimpangan yang diizinkan (*authorized deviation*), jika ada.

139.095 Data dan Informasi Bandar Udara Perairan (Water Aerodrome)

Register Bandar Udara Perairan (*Water Aerodrome*) harus memuat data dan informasi sekurang- kurangnya:

- a. nama bandar udara;
- b. lokasi bandar udara;
- c. status dan operasi;
- d. *Aerodrome Reference Point (ARP)*;
- e. penyelenggara bandar udara;
- f. dimensi *daerah permukaan air (water operating area dimension)*;
- g. *Aerodrome Reference Code (ARC)*;
- h. kondisi permukaan air;
- i. fasilitas pesisir (*shoreline facilities*);
- j. *obstruction restriction*;
- k. tipe *runway*;
- l. tipe pesawat udara terkritis;
- m. kategori PKP-PK;
- n. kondisi operasi tertentu terhadap pelayanan pesawat udara kritikal, jika tersedia;
- o. pembatasan operasi pada bandar udara, jika ada;
- p. penyimpangan yang diizinkan (*authorized deviation*), jika ada; dan
- q. pengecualian (*exemption*).

139.097 Perubahan/Amandemen Register Bandar Udara

1. Perubahan/amandemen register bandar udara dapat dilakukan secara langsung oleh Direktur Jenderal atau atas permintaan penyelenggara bandar udara setelah dilakukan evaluasi.
2. Perubahan/amandemen register bandar udara dapat dilakukan apabila ada perubahan data atau informasi dalam register bandar udara.
3. Direktur Jenderal menyampaikan perubahan data dan informasi pada register bandar udara ke AIS.

139.099 Register Bandar Udara Tidak Dapat Dipindahtangankan

Register bandar udara tidak dapat dipindahtangankan.

139.101 Masa Berlaku Register Bandar Udara

Register bandar udara berlaku selama 3 (tiga) tahun kecuali terjadi pencabutan.

139.103 Pencabutan Register Bandar Udara atas Permintaan Penyelenggara Bandar Udara

1. Apabila penyelenggara bandar udara, *heliport* atau *water aerodrome* menghendaki pencabutan register bandar udara, maka penyelenggara bandar udara harus memberitahukan secara tertulis kepada Direktur Jenderal selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pencabutan.
2. Direktur Jenderal harus mencabut register sesuai dengan tanggal pencabutan yang diusulkan oleh pemohon.
3. Pencabutan sebagaimana dimaksud pada butir 2, dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. dipublikasikan melalui *NOTAM*; dan
 - b. menghilangkan/menghapus data bandar udara dari AIP Indonesia.

139.105 Pembekuan atau Pencabutan Registrasi oleh Direktur Jenderal

1. Direktur Jenderal dapat memberikan sanksi jika:
 - a. bagian register dilanggar; atau
 - b. fasilitas, peralatan, perawatan atau pengoperasian bandar udara tidak memenuhi standar keselamatan penerbangan.
2. Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam butir 1 berupa:
 - a. pembatasan kemampuan operasional bandar udara; dan
 - b. sanksi administratif, meliputi:
 - 1) peringatan tertulis;
 - 2) pembekuan register bandar udara;
 - 3) pencabutan register bandar udara; dan/atau
 - 4) denda administratif.
3. Sebelum pembekuan atau pencabutan register bandar udara, Direktur Jenderal harus:
 - a. memberikan pemberitahuan kepada pemegang sertifikat perihal:
 - 1) penetapan fakta dan kondisi yang akan menjadi dasar pembekuan atau pencabutan oleh Direktur Jenderal; dan
 - 2) mengundang secara tertulis kepada pemegang sertifikat untuk menjelaskan alasan agar register tidak dibekukan atau dicabut.
 - b. mempertimbangkan segala penjelasan atau keterangan yang diberikan oleh pemegang register sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 2) untuk diambil keputusan.
4. Selama dibekukan, penyelenggara bandar udara dilarang mengoperasikan bandar udara.

139.107 Register Bandar Udara Sementara (*Temporary Aerodrome Register*)

1. Dalam keadaan tertentu, Direktur Jenderal dapat menerbitkan Register Bandar Udara Sementara (*Temporary Aerodrome Register*) apabila pemohon diyakini dapat dengan baik mengoperasikan dan melakukan perawatan terhadap bandar udara selama masa berlakunya register bandar udara sementara.
2. Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada butir 1 antara lain terdiri dari:
 - a. terjadi bencana alam atau keadaan darurat lainnya;
 - b. kegiatan Pejabat Pemerintahan; atau
 - c. untuk angkutan udara niaga tidak terjadwal dan angkutan udara bukan niaga.
3. Register Bandar Udara Sementara (*Temporary Aerodrome Register*) diberikan untuk jangka waktu 30 (tiga puluh) hari dan dapat diperpanjang hanya 1 (satu) kali.
4. Jika Direktur Jenderal menilai dan memutuskan untuk menerbitkan register sementara, akan:
 - a. memberitahu pemohon, secara tertulis bahwa bandar udara tersebut telah diterbitkan register; dan
 - b. menerbitkan/mengumumkan data lengkap bandar udara dalam AIP Indonesia.

139.109 Penerapan Standar untuk Register Bandar Udara

1. Penerapan standar untuk register pada bandar udara atau *heliport* atau *water aerodrome* meliputi:
 - a. Standar Teknis dan Operasi (*Manual of Standard/MOS*) Bagian 139 Volume I tentang Bandar Udara (*Aerodrome*);
 - b. Standar Teknis dan Operasi (*Manual of Standard/MOS*) Bagian 139 Volume II tentang Tempat Pendaratan dan Lepas Landas Helikopter (*Heliport*);
 - c. Standar Teknis dan Operasi (*Manual of Standard/MOS*) Bagian 139 Volume III tentang Bandar Udara Perairan (*Water Aerodrome*); dan
 - d. Standar Teknis dan Operasi (*Manual of Standard/MOS*) Bagian 139 Volume IV tentang Pertolongan Kecelakaan Penerbangan dan Pemadam Kebakaran (PKP-PK).
2. Setiap standar lain yang mengarah pada Standar Teknis dan Operasi MOS 139 yang dapat diterapkan pada bandar udara beregister.
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai register bandar udara diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal.

139.111 Kompetensi Personel

1. Penyelenggara bandar udara beregister termasuk *heliport* dan *water aerodrome* wajib mempekerjakan personel yang memiliki kemampuan dan kualifikasi yang sesuai bidangnya sebagaimana diatur pada ketentuan 139.035.

2. Penyelenggara bandar udara beregister termasuk *heliport* dan *water aerodrome* harus menjamin bahwa semua personel yang dipekerjakan mendapatkan pendidikan dan/atau pelatihan yang memadai.

139.113 Pemberitahuan atas Perubahan dalam Informasi yang Dipublikasikan dalam AIP

1. Penyelenggara bandar udara beregister termasuk *heliport* dan *water aerodrome* wajib melaporkan setiap perubahan data informasi bandar udara untuk dipublikasikan dalam AIP.
2. Penyelenggara bandar udara harus membuat *Letter of Agreement* (LOA) atau sejenisnya dengan unit pelayanan informasi aeronautika di unit ATS bandar udara masing – masing untuk memastikan mekanisme dan koordinasi penerbitan NOTAM.
3. Perubahan data dan informasi bandar udara harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Direktur Jenderal untuk memastikan keakuratan dan pemenuhan persyaratan data integritas aeronautika .
4. Direktur Jenderal akan menerbitkan hasil persetujuan perubahan data dan informasi bandar udara kepada AIS untuk dipublikasikan kepada AIP.
5. Penyelenggara bandar udara beregister termasuk *heliport* dan *water aerodrome* wajib mengklarifikasi AIP yang sudah dipublikasi oleh AIS.

139.115 Pemeriksaan Keselamatan

1. Peraturan ini berlaku untuk penyelenggara bandar udara yang memiliki register khusus bandar udara, termasuk register *heliport* dan register *water aerodrome*.
2. Penyelenggara bandar udara termasuk *heliport* atau *water aerodrome* harus mengatur waktu pelaksanaan pemeriksaan keselamatan yang dilakukan sedikitnya sekali dalam 1 (satu) tahun.
3. Pemeriksaan keselamatan dilakukan oleh inspektur bandar udara atau badan hukum Indonesia yang ditunjuk atau diberi kewenangan atau izin oleh Direktur Jenderal.
4. Inspektur Bandar Udara atau badan hukum Indonesia yang melaksanakan pemeriksaan keselamatan harus memberi laporan tertulis pada penyelenggara bandar udara beregister:
 - a. hasil pemeriksaan keselamatan sesuai *checklist* dalam *Staff Instruction (SI)* 139-01; dan
 - b. menyebutkan tindak lanjut yang dibutuhkan untuk pemenuhan standar teknis dan operasi bandar udara.
5. Dalam 30 (tiga puluh) hari setelah menerima laporan, penyelenggara bandar udara beregister termasuk *heliport* dan *water aerodrome* harus memberikan kepada Direktur Jenderal:
 - a. *copy* dari laporan; dan

- b. apabila laporan menyebutkan tindak lanjut perbaikan yang diperlukan, maka diperlukan pernyataan yang menyebutkan kapan dan bagaimana penyelenggara bandar udara melakukan perbaikan tersebut.
6. Register khusus bandar udara, *heliport* atau *water aerodrome* dapat dibekukan atau dicabut bila ketentuan peraturan pada butir 2 tidak dilakukan atau berdasarkan laporan pemeriksaan keselamatan dinyatakan tidak laik dioperasikan atau tidak memenuhi persyaratan teknis operasional.

SUB BAGIAN 139 D BUKU PEDOMAN PENGOPERASIAN BANDAR UDARA

Buku pedoman pengoperasian bandar udara terdiri dari:

1. Buku Pedoman Pengoperasian Bandar Udara (*Aerodrome Manual*) untuk Bandar Udara Bersertifikat;
2. Buku Pedoman Pengoperasian Bandar Udara (*Aerodrome Manual*) untuk Bandar Udara Beregister;
3. Buku Pedoman Pengoperasian Tempat Pendaratan dan Lepas Landas Helikopter (*Heliport Manual*) untuk Tempat Pendaratan dan Lepas Landas Helikopter (*Heliport*); dan
4. Buku Pedoman Pengoperasian Bandar Udara Perairan (*Water Aerodrome Manual*) untuk Bandar Udara Perairan (*Water Aerodrome*).

SUB BAGIAN 139 D.1 Buku Pedoman Pengoperasian Bandar Udara (*Aerodrome Manual*)

139.117 Format Buku Pedoman Pengoperasian Bandar Udara (*Aerodrome Manual*)

1. Ketentuan penyusunan *Aerodrome Manual* sebagai berikut:
 - a. ditandatangani oleh penyelenggara bandar udara;
 - b. dalam bentuk ketikan atau cetakan;
 - c. terdapat kolom penerimaan (*acceptance*) dari Direktur Jenderal pada tiap halaman;
 - d. dijilid dalam bentuk yang mudah untuk memasukkan perubahan dan penggantian;
 - e. disediakan sistem:
 - 1) penataan perubahan dan penggantian yang telah dilakukan;
 - 2) pelaksanaan perubahan dan penggantian ke dalam *Aerodrome Manual*; dan
 - 3) rekaman sejarah perubahan dan penggantian yang telah dilakukan.
2. *Aerodrome Manual* dapat lebih dari satu dokumen, dengan ketentuan masing-masing dokumen merupakan referensi dari dokumen lain.
3. Salinan tambahan dari *Aerodrome Manual* dapat disimpan dalam bentuk rekaman elektronik.

139.119 Penyimpanan Buku Pedoman Pengoperasian Bandar Udara (Aerodrome Manual)

1. Penyelenggara bandar udara harus menyimpan setidaknya 1 (satu) buah *Aerodrome Manual* yang lengkap dan salinan terbaru dalam bentuk cetakan.
2. Penyelenggara bandar udara harus menyampaikan *Aerodrome Manual* yang lengkap dan salinan terbaru kepada Direktur Jenderal.
3. Penyelenggara bandar udara harus membuat salinan *Aerodrome Manual* sebagaimana dimaksud butir 1 untuk kepentingan pemeriksaan oleh orang yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal atau Inspektur Bandar Udara.

139.121 Informasi Yang Tercakup Dalam Buku Pedoman Pengoperasian Bandar Udara (Aerodrome Manual)

1. *Aerodrome Manual* sekurang-kurangnya memuat informasi tentang bandar udara sesuai ketentuan yang telah diatur dalam Appendix 1 PKPS Bagian 139, dengan urutan sebagai berikut:
 - a. Bab I Informasi Umum (*General Information*);
 - b. Bab II Data atau Informasi Lokasi Bandar Udara (*Aerodrome Data*);
 - c. Bab III Data atau Informasi yang dilaporkan kepada Pelayanan Informasi Aeronautika (*Aeronautical Information Service/AIS*);
 - d. Bab IV Prosedur Pengoperasian Bandar Udara (*Aerodrome Operating Procedures*);
 - e. Bab V Penyelenggaraan Administrasi Bandar Udara dan Sistem Manajemen Keselamatan Bandar Udara (*Aerodrome Administration and Safety Management System*).
2. Apabila informasi sebagaimana dimaksud pada butir 1 tidak tersedia atau tidak berlaku di bandar udara tersebut, maka penyelenggara bandar udara harus menjelaskan keterangan tersebut dalam *Aerodrome Manual* beserta alasannya yang disertai kajian keselamatan (*risk assesment*).
3. Apabila Direktur Jenderal menerbitkan suatu pembebasan ketentuan (*exemption*), sebagaimana dimaksud dalam 139.177, maka hal tersebut harus dimasukkan ke dalam *Aerodrome Manual*. Informasi pembebasan ketentuan (*exemption*) sekurang-kurangnya memuat :
 - a. nomor identifikasi yang diberikan oleh Direktur Jenderal untuk masing-masing pembebasan ketentuan (*exemption*);
 - b. tanggal berakhirnya masing-masing pembebasan ketentuan (*exemption*); dan
 - c. semua kondisi (persyaratan), batasan-batasan serta prosedur yang berkenaan dengan pembebasan ketentuan (*exemption*).

139.123 Perubahan Buku Pedoman Pengoperasian Bandar Udara (Aerodrome Manual)

1. Penyelenggara bandar udara harus melakukan perubahan terhadap *Aerodrome Manual* apabila diperlukan atau setidaknya 6 (enam) bulan sekali untuk memastikan status amandemen serta data dan informasi yang disediakan tetap akurat.

2. Berdasarkan pemberitahuan secara tertulis dari Direktur Jenderal, penyelenggara bandar udara harus melakukan perubahan terhadap *Aerodrome Manual* untuk menyesuaikan dengan Standar Teknis dan Operasi (*Manual of Standard/MOS*) Bagian 139 Volume I Bandar Udara sehingga tetap akurat.
3. Penyelenggara bandar udara wajib menyampaikan setiap perubahan *Aerodrome Manual* secara tertulis kepada Direktur Jenderal selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari untuk mendapatkan persetujuan.

139.125 Pengawas Buku Pedoman Pengoperasian Bandar Udara (*Aerodrome Manual*)

1. Penyelenggara bandar udara wajib menunjuk personel atau unit kerja untuk melakukan pengawasan terhadap *Aerodrome Manual*.
2. Fungsi pengawas *Aerodrome Manual* adalah memastikan bahwa:
 - b. *Aerodrome Manual* diamandemen sesuai data dan informasi terkini.
 - c. catatan masih dipegang sesuai daftar salinan *Aerodrome Manual*; dan
 - d. amandemen terakhir *Aerodrome Manual* disampaikan pada para pemegang.

139.127 Status Buku Pedoman Pengoperasian Bandar Udara (*Aerodrome Manual*)

Penyelenggara Bandar Udara wajib menyampaikan *Aerodrome Manual* beserta perubahan terakhir sesuai ketentuan yang berlaku kepada Direktur Jenderal.

SUB BAGIAN 139 D.2 Buku Pedoman Pengoperasian Bandar Udara Beregister (*Registered Aerodrome Manual*)

139.129 Penyiapan Buku Pedoman Pengoperasian Bandar Udara Beregister (*Registered Aerodrome Manual*)

Penyelenggara bandar udara beregister harus memiliki *Registered Aerodrome Manual* sesuai persyaratan dalam peraturan 139.085 butir 3 huruf a.

139.131 Format Buku Pedoman Pengoperasian Bandar Udara Beregister (*Registered Aerodrome Manual*)

1. Ketentuan penyusunan *Registered Aerodrome Manual* sebagai berikut:
 - a. ditandatangani oleh penyelenggara bandar udara;
 - b. dalam bentuk ketikan atau cetakan;
 - c. terdapat kolom penerimaan (*acceptance*) dari Direktur Jenderal pada tiap halaman;
 - d. dijilid dalam bentuk yang mudah untuk memasukkan perubahan dan penggantian;
 - e. disediakan sistem :
 - 1) penataan perubahan dan penggantian yang telah dilakukan;
 - 2) pelaksanaan perubahan dan penggantian ke dalam *Registered Aerodrome Manual*; dan
 - 3) rekaman sejarah perubahan dan penggantian yang telah dilakukan.

2. *Registered Aerodrome Manual* dapat lebih dari satu dokumen, dengan ketentuan masing-masing dokumen merupakan referensi dari dokumen lain.
3. Salinan tambahan dari *Registered Aerodrome Manual* dapat disimpan dalam bentuk rekaman elektronik.

139.133 Penyimpanan Buku Pedoman Pengoperasian Bandar Udara Beregister (*Registered Aerodrome Manual*)

1. Penyelenggara bandar udara harus menyimpan setidaknya 1 (satu) buah *Registered Aerodrome Manual* yang lengkap dan salinan terbaru dalam bentuk cetakan.
2. Penyelenggara bandar udara harus menyampaikan *Registered Aerodrome Manual* yang lengkap dan salinan terbaru kepada Direktur Jenderal.
3. Penyelenggara bandar udara harus membuat salinan *Registered Aerodrome Manual* sebagaimana dimaksud butir 1 untuk kepentingan pemeriksaan oleh orang yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal atau Inspektur Bandar Udara.

139.135 Informasi Yang Tercakup Dalam Buku Pedoman Pengoperasian Bandar Udara Beregister (*Registered Aerodrome Manual*)

1. *Registered Aerodrome Manual* sekurang-kurangnya memuat informasi tentang bandar udara sesuai ketentuan yang telah diatur dalam Appendix 2A PKPS Bagian 139, dengan urutan sebagai berikut:
 - a. Bab I Informasi Umum (*General Information*);
 - b. Bab II Data atau Informasi Lokasi Bandar Udara;
 - c. Bab III Data atau Informasi yang dilaporkan kepada Pelayanan Informasi Aeronautika (*Aeronautica Information Service/AIS*);
 - d. Bab IV Prosedur Pengoperasian Bandar Udara (*Aerodrome Operating Procedures*);
 - e. Bab V Penyelenggaraan Administrasi Bandar Udara.
2. Apabila informasi sebagaimana dimaksud pada butir 1 tidak tersedia atau tidak berlaku di bandar udara tersebut, maka penyelenggara bandar udara harus menjelaskan keterangan tersebut dalam *Registered Aerodrome Manual* beserta alasannya yang disertai kajian keselamatan (*risk assesment*).
3. Apabila Direktur Jenderal menerbitkan suatu pembebasan ketentuan (*exemption*), sebagaimana dimaksud dalam 139.177, maka hal tersebut harus dimasukkan ke dalam *Registered Aerodrome Manual*. Informasi pembebasan ketentuan (*exemption*) sekurang-kurangnya memuat:
 - a. nomor identifikasi yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Udara untuk masing-masing pembebasan ketentuan (*exemption*);
 - b. tanggal berakhirnya masing-masing pembebasan ketentuan (*exemption*); dan
 - c. semua kondisi (persyaratan), batasan-batasan serta prosedur yang berkenaan dengan pembebasan ketentuan (*exemption*).

139.137 Perubahan Buku Pedoman Pengoperasian Bandar Udara Beregister (*Registered Aerodrome Manual*)

1. Penyelenggara bandar udara harus melakukan perubahan terhadap *Registered Aerodrome Manual* apabila diperlukan atau setidaknya 6 (enam) bulan sekali untuk memastikan status amandemen serta data dan informasi yang disediakan tetap akurat.
2. Berdasarkan pemberitahuan secara tertulis dari Direktur Jenderal, penyelenggara bandar udara harus melakukan perubahan terhadap *Registered Aerodrome Manual* untuk menyesuaikan dengan Standar Teknis dan Operasi (*Manual of Standard/MOS*) Bagian 139 Bandar Udara.
3. Penyelenggara bandar udara beregister wajib menyampaikan setiap perubahan *Registered Aerodrome Manual* secara tertulis kepada Direktur Jenderal selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak adanya perubahan untuk mendapatkan persetujuan.

139.139 Pengawas Buku Pedoman Pengoperasian Bandar Udara Beregister (*Registered Aerodrome Manual*)

1. Penyelenggara bandar udara beregister wajib menunjuk personel atau unit kerja untuk melakukan pengawasan terhadap *Registered Aerodrome Manual*.
2. Fungsi pengawas *Registered Aerodrome Manual* adalah memastikan bahwa:
 - a. *Registered Aerodrome Manual* diamandemen sesuai data dan informasi terkini;
 - b. catatan masih dipegang sesuai daftar salinan *Registered Aerodrome Manual*; dan
 - c. amandemen terakhir *Registered Aerodrome Manual* disampaikan pada para pemegang.

139.141 Status Buku Pedoman Pengoperasian Bandar Udara Beregister (*Registered Aerodrome Manual*)

Direktur Jenderal wajib menerima *Registered Aerodrome Manual* beserta perubahan sesuai ketentuan yang berlaku.

SUB BAGIAN 139 D.3 Buku Pedoman Pengoperasian Tempat Pendaratan dan Lepas Landas Helikopter (*Heliport Manual*)

139.143 Penyiapan Buku Pedoman Pengoperasian Tempat Pendaratan dan Lepas Landas Helikopter (*Heliport Manual*)

Penyelenggara Tempat Pendaratan dan Lepas Landas Helikopter (*Heliport*) harus memiliki Buku Pedoman Pengoperasian Tempat Pendaratan dan Lepas Landas Helikopter (*Heliport Manual*) sesuai persyaratan dalam peraturan 139.085 butir 3 huruf b.

139.145 Format Penyiapan Buku Pedoman Pengoperasian Tempat Pendaratan dan Lepas Landas Helikopter (*Heliport Manual*)

1. Ketentuan *Heliport Manual* sebagai berikut:
 - a. ditandatangani oleh penyelenggara *Heliport* ;
 - b. dalam bentuk ketikan atau cetakan;
 - c. terdapat kolom penerimaan (*acceptance*) dari Direktur Jenderal pada tiap halaman;
 - d. dijilid dalam bentuk yang mudah untuk memasukkan perubahan dan penggantian;
 - e. disediakan sistem :
 - 1) penataan perubahan dan penggantian yang telah dilakukan;
 - 2) pelaksanaan perubahan dan penggantian ke dalam Pedoman Pengoperasian Pengoperasian Tempat Pendaratan Dan Lepas Landas Helikopter; dan
 - 3) rekaman sejarah perubahan dan penggantian yang telah dilakukan.
2. *Heliport Manual* dapat lebih dari satu dokumen, dengan ketentuan masing-masing dokumen merupakan referensi dari dokumen lain.
3. Salinan tambahan dari *Heliport Manual* dapat disimpan dalam bentuk rekaman elektronik.

139.147 Penyimpanan Buku Pedoman Pengoperasian Tempat Pendaratan dan Lepas Landas Helikopter (*Heliport Manual*)

1. Penyelenggara Tempat Pendaratan dan Lepas Landas Helikopter (*Heliport*) harus menyimpan setidaknya 1 (satu) buah *Heliport Manual* yang lengkap dan salinan terbaru dalam bentuk cetakan.
2. Penyelenggara Tempat Pendaratan dan Lepas Landas Helikopter (*Heliport*) harus menyampaikan *Heliport Manual* yang lengkap dan salinan terbaru kepada Direktur Jenderal.
3. Penyelenggara Tempat Pendaratan dan Lepas Landas Helikopter (*Heliport*) harus membuat salinan *Heliport Manual* sebagaimana dimaksud butir 1 untuk kepentingan pemeriksaan oleh orang yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal atau Inspektur Bandar Udara.

139.149 Informasi Yang Tercakup Dalam Penyiapan Buku Pedoman Pengoperasian Tempat Pendaratan dan Lepas Landas Helikopter (*Heliport Manual*)

1. *Heliport Manual* sekurang-kurangnya memuat informasi tentang bandar udara sesuai ketentuan yang telah diatur dalam Appendix 2B PKPS Bagian 139, dengan urutan sebagai berikut:
 - a. Bab I, berisi tentang : Data dan Informasi Umum (*General Information*), termasuk Struktur Organisasi Penyelenggara *Heliport*
 - b. Bab II, berisi tentang : Data dan Informasi Lokasi dan Fasilitas Tempat Pendaratan dan Lepas Landas Helikopter (*Heliport Data and Facilities*);
 - c. Bab III, berisi tentang: Standar Prosedur Pengoperasian Tempat Pendaratan dan Lepas Landas Helikopter (*Heliport Standard Operating Procedures*);

- d. Bab IV, berisi tentang: Sistem Pelaporan (*Reporting System*)
2. Apabila informasi sebagaimana dimaksud pada butir 1 tidak tersedia atau tidak berlaku di Tempat Pendaratan dan Lepas Landas Helikopter tersebut, maka penyelenggara Tempat Pendaratan dan Lepas Landas Helikopter (*Heliport*) harus menjelaskan keterangan tersebut dalam *Heliport Manual* beserta alasannya yang disertai kajian keselamatan (*risk assesment*).
 3. Apabila Direktorat Jenderal Perhubungan Udara menerbitkan suatu pembebasan ketentuan (*exemption*), sebagaimana dimaksud dalam 139.177, maka hal tersebut harus dimasukkan ke dalam *Heliport Manual*. Informasi pembebasan ketentuan (*exemption*) sekurang-kurangnya memuat:
 - a. nomor identifikasi yang diberikan oleh Direktur Jenderal untuk masing-masing pembebasan ketentuan (*exemption*);
 - b. tanggal berakhirnya masing-masing pembebasan ketentuan (*exemption*); dan
 - c. semua kondisi (persyaratan), batasan-batasan serta prosedur yang berkenaan dengan pembebasan ketentuan (*exemption*).

139.151 Perubahan Buku Pedoman Pengoperasian Tempat Pendaratan dan Lepas Landas Helikopter (*Heliport Manual*)

1. Penyelenggara Tempat Pendaratan dan Lepas Landas Helikopter (*Heliport*) harus melakukan perubahan terhadap *Heliport Manual* apabila diperlukan atau setidaknya 6 (enam) bulan sekali untuk memastikan status amandemen serta data dan informasi yang disediakan tetap akurat.
2. Berdasarkan pemberitahuan secara tertulis dari Direktur Jenderal, penyelenggara tempat pendaratan dan lepas landas Helikopter harus melakukan perubahan terhadap *Heliport Manual* untuk menyesuaikan dengan Standar Teknis dan Operasi (*Manual of Standard/MOS*) Bagian 139 Volume II.
3. Penyelenggara Tempat Pendaratan dan Lepas Landas Helikopter (*Heliport*) wajib menyampaikan setiap perubahan *Heliport Manual* secara tertulis kepada Direktorat Jenderal Perhubungan Udara selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari untuk mendapatkan persetujuan.

139.153 Pengawas Buku Pedoman Pengoperasian Tempat Pendaratan dan Lepas Landas Helikopter (*Heliport Manual*)

1. Penyelenggara Tempat Pendaratan dan Lepas Landas Helikopter (*Heliport*) wajib menunjuk personel atau unit kerja untuk melakukan pengawasan terhadap *Heliport Manual*.
2. Fungsi pengawas *Heliport Manual* adalah memastikan bahwa:
 - a. *Heliport Manual* diamandemen sesuai data dan informasi terkini;
 - b. catatan masih dipegang sesuai daftar salinan *Heliport Manual*; dan
 - c. amandemen terakhir *Heliport Manual* disampaikan pada para pemegang.

139.155 Status Buku Pedoman Pengoperasian Tempat Pendaratan dan Lepas Landas Helikopter (*Heliport Manual*)

Penyelenggara Tempat Pendaratan dan Lepas Landas Helikopter (*Heliport*) wajib menyampaikan *Heliport Manual* beserta perubahan terakhir sesuai ketentuan yang berlaku kepada Direktur Jenderal.

SUB BAGIAN 139 D.4 Buku Pedoman Pengoperasian Bandar Udara Perairan (*Water Aerodrome Manual*)

139.157 Penyiapan Buku Pedoman Pengoperasian Bandar Udara Perairan (*Water Aerodrome Manual*)

Penyelenggara bandar udara perairan (*water aerodrome*) harus memiliki Buku Pedoman Pengoperasian Bandar Udara Perairan sesuai persyaratan dalam peraturan 139.085 butir 3 huruf c.

139.159 Format Buku Pedoman Pengoperasian Bandar Udara Perairan (*Water Aerodrome Manual*)

1. Ketentuan penyusunan *Water Aerodrome Manual* sebagai berikut:
 - a. ditandatangani oleh penyelenggara bandar udara perairan;
 - b. dalam bentuk ketikan atau cetakan;
 - c. terdapat kolom penerimaan (*acceptance*) dari Direktur Jenderal pada tiap halaman;
 - d. dijilid dalam bentuk yang mudah untuk memasukkan perubahan dan penggantian;
 - e. disediakan sistem:
 - 1) penataan perubahan dan penggantian yang telah dilakukan;
 - 2) pelaksanaan perubahan dan penggantian ke dalam *Water Aerodrome Manual*; dan
 - 3) rekaman sejarah perubahan dan penggantian yang telah dilakukan.
2. *Water Aerodrome Manual* dapat lebih dari satu dokumen, dengan ketentuan masing-masing dokumen merupakan referensi dari dokumen lain.
3. Salinan tambahan dari *Water Aerodrome Manual* dapat disimpan dalam bentuk rekaman elektronik.

139.161 Penyimpanan Buku Pedoman Pengoperasian Bandar Udara Perairan (*Water Aerodrome Manual*)

1. Penyelenggara Bandar Udara Perairan (*Water Aerodrome*) harus menyimpan setidaknya 1 (satu) buah *Water Aerodrome Manual* yang lengkap dan salinan terbaru dalam bentuk cetakan.
2. Penyelenggara Bandar Udara Perairan (*Water Aerodrome*) harus menyampaikan *Water Aerodrome Manual* yang lengkap dan salinan terbaru kepada Direktur Jenderal.

3. Penyelenggara Bandar Udara Perairan (*Water Aerodrome*) harus membuat salinan *Water Aerodrome Manual* sebagaimana dimaksud butir 1 untuk kepentingan pemeriksaan oleh orang yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal atau Inspektur Bandar Udara.

139.163 Informasi Yang Tercakup Dalam Buku Pedoman Pengoperasian Bandar Udara Perairan (*Water Aerodrome Manual*)

1. *Water Aerodrome Manual* sekurang-kurangnya memuat informasi tentang bandar udara sesuai ketentuan yang telah diatur dalam Appendix 2C PKPS Bagian 139, dengan urutan sebagai berikut:
 - a. Bab I Informasi Umum (*General Information*) termasuk struktur organisasi penyelenggara bandar udara perairan (*Water Aerodrome*);
 - b. Bab II Data dan Fasilitas Bandar Udara Perairan (*Water Aerodrome Data and Facilities*);
 - c. Bab III Prosedur Pengoperasian Bandar Udara Perairan (*Water Aerodrome Operating Procedures*);
 - d. Bab IV Sistem pelaporan (*Reporting System*).
2. Apabila informasi sebagaimana dimaksud pada butir 1 tidak tersedia atau tidak berlaku di bandar udara perairan (*water aerodrome*) tersebut, maka penyelenggara bandar udara perairan harus menjelaskan keterangan tersebut dalam *water aerodrome manual* beserta alasannya yang disertai kajian keselamatan (*risk assesment*).
3. Apabila Direktur Jenderal menerbitkan suatu pembebasan ketentuan (*exemption*), sebagaimana dimaksud dalam 139.177, maka hal tersebut harus dimasukkan ke dalam *water aerodrome manual*. Informasi pembebasan ketentuan (*exemption*) sekurang-kurangnya memuat :
 - a. nomor identifikasi yang diberikan oleh Direktur Jenderal untuk masing-masing pembebasan ketentuan (*exemption*);
 - b. tanggal berakhirnya masing-masing pembebasan ketentuan (*exemption*); dan
 - c. semua kondisi (persyaratan), batasan-batasan serta prosedur yang berkenaan dengan pembebasan ketentuan (*exemption*).

139.165 Perubahan Buku Pedoman Pengoperasian Bandar Udara Perairan (*Water Aerodrome Manual*)

1. Penyelenggara Bandar Udara Perairan (*Water Aerodrome*) harus melakukan perubahan terhadap *water aerodrome manual* apabila diperlukan atau setidaknya 6 (enam) bulan sekali untuk memastikan status amandemen serta data dan informasi yang disediakan tetap akurat.
2. Berdasarkan pemberitahuan secara tertulis dari Direktur Jenderal, penyelenggara bandar udara perairan (*water aerodrome*) harus melakukan perubahan terhadap *water aerodrome manual* untuk menyesuaikan dengan Standar Teknis dan Operasi (*Manual of Standard/MOS*) Bagian 139 Volume III Bandar Udara Perairan (*water aerodrome*) sehingga tetap akurat.

3. Penyelenggara Bandar Udara Perairan (*Water Aerodrome*) wajib menyampaikan setiap perubahan *water aerodrome manual* secara tertulis kepada Direktur Jenderal selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari untuk mendapatkan persetujuan.

139.167 Pengawas Buku Pedoman Pengoperasian Bandar Udara Perairan (*Water Aerodrome Manual*)

1. Penyelenggara Bandar Udara Perairan (*Water Aerodrome*) wajib menunjuk personel atau unit kerja untuk melakukan pengawasan terhadap *water aerodrome manual*.
2. Fungsi pengawas *water aerodrome manual* adalah memastikan bahwa:
 - a. *Water Aerodrome Manual* diamandemen sesuai data dan informasi terkini;
 - b. catatan masih dipegang sesuai daftar salinan *water aerodrome manual*; dan
 - c. amandemen terakhir *water aerodrome manual* disampaikan pada para pemegang.

139.169 Status Buku Pedoman Pengoperasian Bandar Udara Perairan (*Water Aerodrome Manual*)

Direktur Jenderal wajib menerima *water aerodrome manual* beserta perubahan sesuai ketentuan yang berlaku.

SUB BAGIAN 139 E PETUGAS PELAPORAN (*REPORTING OFFICER*)

139.171 Petugas Pelaporan (*Reporting Officer*)

1. Penyelenggara bandar udara bersertifikat dan beregister termasuk *heliport* dan *water aerodrome* wajib menunjuk 1 (satu) atau lebih petugas pelaporan.
2. Petugas pelaporan sebagaimana dimaksud pada butir 1, bertugas:
 - a. melakukan pengawasan terhadap kemampuan operasional bandar udara/*heliport*/*water aerodrome*;
 - b. melaporkan setiap *incident* dan *accident* termasuk yang disebabkan oleh *bird strike* kepada Direktorat Jenderal Perhubungan Udara untuk disampaikan kepada *ICAO Bird Strike Information System (IBIS)*;
 - c. mengajukan penerbitan *NOTAM* ke Unit Pelayanan Informasi Aeronautika di unit ATS bandar udara masing-masing atau di unit ATS bandar udara yang melayaninya untuk setiap perubahan yang terjadi di bandar udara/*heliport*/*water aerodrome* sesuai dengan ketentuan 139.079 termasuk perubahan kategori PKP-PK;
 - d. informasi sebagaimana dimaksud pada huruf c harus disampaikan secara tertulis kepada Unit Pelayanan Informasi Aeronautika Aeronautika di unit ATS bandar udara masing-masing atau di unit ATS Bandar Udara yang melayaninya untuk dipublikasikan dalam AIP; dan
 - e. mengklarifikasi kebenaran dan keakuratan data dan informasi AIP.
3. Penyelenggara bandar udara/*heliport*/*water aerodrome* wajib memberikan pendidikan dan/atau pelatihan yang memadai kepada petugas pelaporan.

SUB BAGIAN 139 F OBSTACLE DAN HAZARD

Penyelenggara bandar udara harus memastikan bahwa Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (*obstacle limitation surface*) untuk bandar udara bersangkutan telah dibuat sesuai dengan Standar Teknis dan Operasi (*Manual of Standard/MOS*) Bagian 139.

139.173 Pemantauan Ruang Udara

1. Penyelenggara bandar udara/*heliport/water aerodrome* harus melakukan pemantauan terhadap ruang udara di sekitar bandar udara/*heliport/water aerodrome* untuk mengetahui adanya pelanggaran terhadap Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (*obstacle limitation surface*) oleh suatu objek (bangunan, struktur lainnya, atau benda tumbuh).
2. Apabila terdapat perencanaan pembangunan di atas, di bawah atau di luar Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (*obstacle limitation surface*) maka penyelenggara bandar udara wajib berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah atau instansi terkait lainnya guna pelaksanaan pemenuhan dari ketentuan Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (*obstacle limitation surface*).
3. Pemantauan terhadap ruang udara harus sesuai dengan Standar Teknis dan Operasi (*Manual of Standard/MOS*) Bagian 139.
4. Penyelenggara bandar udara/*heliport/water aerodrome* harus mengambil semua langkah yang diperlukan untuk menjamin bahwa *obstacle* yang terdapat di bandar udara/*heliport/water aerodrome* atau di sekitar bandar udara/*heliport/water aerodrome* dapat terdeteksi sesegera mungkin.

139.175 Pemberitahuan Adanya Obstacle

Apabila penyelenggara bandar udara/*heliport/water aerodrome* mengetahui adanya suatu halangan (*obstacle*), maka harus segera memberitahukan kepada Unit Pelayanan Informasi Aeronautika di unit ATS bandar udara masing-masing atau di unit ATS bandar udara yang melayaninya dan menyampaikan secara rinci tentang lokasi, ketinggian *obstacle* dimaksud dan membuat amandemen terhadap *runway declared distance* apabila diperlukan.

SUB BAGIAN 139 G PENGECCUALIAN (*EXEMPTION*)

139.177 Pengecualian dari Kewajiban (*Exemption*)

1. Direktur Jenderal secara tertulis dapat memberikan pengecualian kepada penyelenggara bandar udara bersertifikat atau beregister dari kewajiban untuk memenuhi hal-hal yang tertulis dalam peraturan ini.
2. Sebelum memutuskan untuk memberikan pengecualian, Direktur Jenderal harus memperhitungkan dan mempertimbangkan aspek keselamatan penerbangan guna mencapai faktor resiko serendah mungkin sebagaimana dalam Kebijakan Keselamatan Penerbangan Nasional, berdasarkan dokumen perencanaan pengelolaan keselamatan (*safety plan*) dan

pelaksanaan *risk mitigation* oleh penyelenggara bandar udara bersertifikat atau beregister.

3. Jika penyelenggara bandar udara bersertifikat atau beregister tidak dapat memenuhi persyaratan standar yang tercantum dalam Standar Teknis dan Operasi (*Manual of Standard/MOS*) Bagian 139, Direktur Jenderal wajib mensyaratkan kepada penyelenggara bandar udara bersertifikat atau beregister untuk membuat dokumen perencanaan pengelolaan keselamatan operasi bandar udara (*safety plan*) dan melaksanakan *risk mitigation* yang dapat menjamin tingkat keselamatan operasi bandar udara.
4. Pengecualian atas kewajiban tergantung pada tingkat kepatuhan penyelenggara bandar udara terhadap persyaratan dan prosedur yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal yang sangat diperlukan dalam pemenuhan aspek keselamatan penerbangan.
5. Penyelenggara bandar udara bersertifikat dan beregister wajib untuk mengevaluasi keefektivitasan mitigasi resiko yang dilaksanakan setidaknya 6 (enam) bulan sekali atau apabila diperlukan.
6. Direktur Jenderal akan menyampaikan pengecualian kepada AIS untuk proses publikasi dalam AIP dan mencantumkan dalam sertifikat atau register bandar udara.

SUB BAGIAN 139 H JAM OPERASI

139.179 Penetapan Jam Operasi Bandar Udara

1. Pengoperasian bandar udara harus memenuhi jam operasi bandar udara.
2. Jam operasi bandar udara ditetapkan oleh Menteri.
3. Untuk melaksanakan penetapan jam operasi, Menteri melimpahkan kepada Direktur Jenderal.

139.181 Tata Cara dan Prosedur Penetapan Jam Operasi Bandar Udara

1. Untuk mendapatkan penetapan jam operasi bandar udara, Penyelenggara Bandar Udara harus mengajukan permohonan tertulis.
2. Jam operasi bandar udara ditetapkan setelah memenuhi persyaratan.
3. Persyaratan penetapan jam operasi bandar udara, dilengkapi dengan:
 - a. kajian kemampuan operasi bandar udara, dan
 - b. buku pedoman pengoperasian bandar udara (*Aerodrome Manual*).
4. Ketentuan mengenai Tata Cara dan Prosedur Penetapan Jam Operasi Bandar Udara diatur lebih lanjut dengan Peraturan Direktur Jenderal.

SUB BAGIAN 139 I PELAYANAN PERTOLONGAN KECELAKAAN PENERBANGAN DAN PEMADAM KEBAKARAN (PKP-PK)

Penyelenggara Bandar Udara wajib menyediakan Pelayanan Pertolongan Kecelakaan Penerbangan dan Pemadam Kebakaran (PKP-PK) sesuai standar yang berlaku.

139.183 Penerapan

1. Ketentuan pada sub bagian ini berlaku untuk Pelayanan Pertolongan Kecelakaan Penerbangan dan Pemadam Kebakaran (PKP-PK) yang diberikan pada bandar udara yang melayani penerbangan sipil.
2. Ketentuan pada sub bagian ini menetapkan standar Pelayanan Pertolongan Kecelakaan Penerbangan dan Pemadam Kebakaran (PKP-PK).

139.185 Tugas dan Fungsi dari PKP-PK

1. Tugas dan fungsi unit PKP-PK di bandar udara adalah:
 - a. memberikan pelayanan PKP-PK untuk menyelamatkan jiwa dan harta benda dari suatu pesawat udara yang mengalami kejadian (*incident*) atau kecelakaan (*accident*) di bandar udara dan sekitarnya;
 - b. mencegah, mengendalikan, memadamkan api, melindungi manusia dan barang yang terancam bahaya kebakaran pada fasilitas di bandar udara.
2. Ketentuan pada butir 1 tidak menghalangi PKP-PK untuk memberikan pelayanan pertolongan atau pemadaman di tempat lain dalam bandar udara, dengan prioritas utama mengacu pada butir 1 di atas.

139.187 Persetujuan Pemberian Pelayanan

1. Orang atau organisasi tidak boleh memberikan pelayanan PKP-PK terkecuali sudah mendapat persetujuan dari Direktur Jenderal.
2. Pada bandar udara yang bersertifikat, Direktur Jenderal akan menentukan pelayanan PKP-PK yang sesuai dengan prosedur sertifikasi bandar udara dan penilaian kepatuhan secara berkelanjutan. Informasi tersebut dijelaskan dalam Pedoman Pengoperasian Bandar Udara.

139.189 Penerbitan Standar Teknis Pengoperasian Bandar Udara

Standar Teknis dan Operasi (*Manual of Standard/MOS*) Bagian 139 yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal harus memuat juga:

- a. standar dan kriteria pelayanan PKP-PK;
- b. standar prosedur, sistem, dan dokumen pelayanan PKP-PK; dan
- c. standar fasilitas PKP-PK.

139.191 Standar Teknis Pengoperasian Bandar Udara

1. Direktur Jenderal menetapkan Standar Teknis dan Operasi (*Manual of Standard/MOS*) Bagian 139 sebagai acuan pemenuhan standar pelayanan PKP-PK, maka penyedia pelayanan PKP-PK wajib memenuhi/mematuhi persyaratan dimaksud.
2. Direktur Jenderal dapat memeriksa kepatuhan penyedia pelayanan PKP-PK terhadap persyaratan yang ditetapkan dalam Standar Teknis dan Operasi (*Manual of Standard/MOS*) Bagian 139 Volume IV Pelayanan Pertolongan Kecelakaan Penerbangan dan Pemadam Kebakaran (PKP-PK).

139.193 Persyaratan yang harus dipenuhi oleh Penyedia Layanan PKP-PK

Apabila standar yang berlaku menghendaki adanya suatu sistem atau prosedur bagi PKP-PK, maka penyedia pelayanan wajib menjamin bahwa sistem atau prosedur dimaksud tersedia dan diimplementasikan.

139.195 Standar dan Persyaratan Pelayanan PKP-PK

1. Untuk bandar udara bersertifikat dan bandar udara terdaftar, standar dan persyaratan pelayanan PKP-PK berlaku ketentuan Standar Teknis dan Operasi (*Manual of Standard/MOS*) Bagian 139 Volume IV Pelayanan Pertolongan Kecelakaan Penerbangan dan Pemadam Kebakaran (PKP-PK).
2. Penyelenggara bandar udara harus menyampaikan tingkat pelayanan PKP-PK kepada lembaga yang membidangi AIS untuk dipublikasikan dalam AIP.
3. Sebelum dilakukan publikasi sebagaimana dimaksud pada butir 2, wajib dilakukan verifikasi data oleh lembaga yang membidangi AIS bersama unit kerja terkait.

139.197 Perbedaan (*Inconsistency*) antara Standar Teknis dan Operasi MOS 139 dengan *Chapter 9 Annex 14*

Apabila persyaratan yang ditetapkan pada Standar Teknis dan Operasi (*Manual of Standard/MOS*) Bagian 139 yang diberlakukan pada suatu bandar udara tidak sama dengan yang ditetapkan dalam *Chapter 9 Annex 14* Konvensi Chicago, maka yang berlaku adalah Standar Teknis dan Operasi (*Manual of Standard/MOS*) Bagian 139 Volume IV Pelayanan Pertolongan Kecelakaan Penerbangan dan Pemadam Kebakaran (PKP-PK).

139.199 Persyaratan Pengetahuan, Peralatan, dan Keahlian untuk Menghadapi Bahaya Keselamatan Penerbangan

Penyedia layanan PKP-PK harus mempunyai pengetahuan, peralatan, dan keahlian untuk menghadapi setiap keadaan bahaya yang mungkin timbul pada saat adanya kejadian, kecelakaan, termasuk semua bahaya yang disebutkan dalam Standar Teknis dan Operasi (*Manual of Standard/MOS*) Bagian 139

Volume IV Pelayanan Pertolongan Kecelakaan Penerbangan dan Pemadam Kebakaran (PKP-PK).

139.201 Kewajiban Mempertahankan Pelayanan PKP-PK

Setiap Bandar Udara wajib menyediakan fasilitas PKP-PK sesuai kategori Bandar Udara untuk PKP-PK yang dipersyaratkan.

139.203 Response Time

Pelaksanaan operasi PKP-PK wajib memenuhi waktu bereaksi (*response time*) yang dipersyaratkan.

139.205 Bangunan dan Fasilitas

Penyedia layanan PKP-PK harus menyediakan bangunan dan fasilitas layanan PKP-PK sebagaimana diatur dalam Standar Teknis dan Operasi (*Manual of Standard/MOS*) Bagian 139 Volume IV Pelayanan Pertolongan Kecelakaan Penerbangan dan Pemadam Kebakaran (PKP-PK).

139.207 Pengumuman Masa Berlaku Pelayanan PKP-PK

1. Penyedia layanan PKP-PK harus memastikan bahwa kemampuan fasilitas PKP-PK harus sama dengan yang dipublikasikan dalam AIP.
2. Apabila karena suatu alasan, pelayanan PKP-PK untuk sementara tidak sesuai ketentuan dalam ketentuan ini, maka penyedia layanan PKP-PK harus menyampaikan kepada *NOTAM Office* tidak lebih dari 24 jam terhadap penurunan kemampuan fasilitas PKP-PK dan perkiraan waktu untuk dapat melayani secara penuh (*full service*).

139.209 Persediaan Bahan Pemadam Api

Di bandar udara harus terdapat persediaan bahan pemadam api sesuai dengan kategori bandar udara untuk PKP-PK, berdasarkan standar yang ditetapkan.

139.211 Kendaraan dan Peralatan PKP-PK

1. Bandar udara harus tersedia kendaraan dan peralatan untuk membawa bahan pemadam api ke tempat kejadian/kebakaran.
2. Harus terdapat kendaraan dan peralatan lainnya apabila diperlukan sesuai dengan standar yang ditetapkan.
3. Setiap kendaraan dan peralatan harus dalam kondisi siap beroperasi dengan baik.

139.213 Kendaraan dan Peralatan untuk Lingkungan yang Sulit

Apabila pergerakan pesawat udara di bandar udara dekat pada daerah perairan atau rawa-rawa atau daerah sulit lainnya yang cukup luas, maka

harus disediakan prosedur atau perjanjian kerjasama (*Memorandum of Understanding*) dengan unit kerja terkait untuk penyediaan kendaraan dan peralatan PKP-PK khusus, sesuai tingkat kesulitan dan bahaya yang dihadapi.

139.215 Pemeriksaan dan Pengujian Kendaraan dan Peralatan PKP-PK

Setiap kendaraan dan peralatan PKP-PK yang akan dioperasikan harus mendapat persetujuan dari Direktur Jenderal setelah memenuhi persyaratan Standar Teknis dan Operasi (*Manual of Standard/MOS*) Bagian 139 Volume IV Pelayanan Pertolongan Kecelakaan Penerbangan dan Pemadam Kebakaran (PKP-PK).

139.217 Komunikasi

Peralatan komunikasi harus tersedia di bandar udara dalam kondisi siap operasi dan jumlah yang memadai pada saat pelaksanaan pelayanan PKP-PK.

139.219 Personel PKP-PK

1. Setiap penyedia layanan PKP-PK harus menyediakan jumlah personel yang memiliki lisensi personel sesuai ketentuan yang berlaku.
2. Program pelatihan personel PKP-PK harus mencakup *human performance (human factor)* termasuk koordinasi tim.
3. Setiap personel PKP-PK yang menangani keadaan darurat harus dilengkapi dengan pakaian pelindung dan alat bantu pernapasan kondisi siap operasi dan jumlah yang memadai.

139.221 Standar Kesehatan Personel PKP-PK

Personel PKP-PK harus memenuhi standar kesehatan yang ditetapkan dan dipertahankan melalui pemeriksaan secara berlanjut/berkala, sehingga dapat diketahui dengan pasti kondisi kesehatan personel PKP-PK.

139.223 Kualifikasi dan Pelatihan Personel PKP-PK

1. Personel PKP-PK harus sudah diberikan pelatihan dan mendapatkan lisensi sesuai dengan standar yang ditetapkan.
2. Apabila bandar udara terletak dekat dengan air dan/atau daerah rawa, atau daerah sulit, maka personel PKP-PK harus mendapatkan pelatihan yang memadai.

139.225 Manual Pengoperasian PKP-PK

Pelayanan PKP-PK di bandar udara harus tersedia manual pengoperasian dan pemeliharaan yang sesuai dengan standar berlaku.

139.227 Amandemen terhadap Manual Pengoperasian PKP-PK

1. Penyedia pelayanan PKP-PK dapat melakukan perubahan manual operasi PKP-PK.
2. Direktur Jenderal dapat memerintahkan penyedia layanan PKP-PK melakukan perubahan manual operasi PKP-PK.

139.229 *Pencatatan Accident dan Incident*

Penyedia layanan PKP-PK harus memiliki sistem pencatatan secara rinci setiap kecelakaan (*accident*) atau kejadian (*incident*) pesawat udara, kebakaran dalam rangka pelayanan PKP-PK sesuai dengan Standar Teknis dan Operasi (*Manual of Standard/MOS*) Bagian 139 Volume IV Pelayanan Pertolongan Kecelakaan Penerbangan dan Pemadam Kebakaran (PKP-PK).

139.231 Organisasi

Setiap bandar udara wajib membentuk organisasi PKP-PK sesuai dengan kategori bandar udara untuk PKP-PK.

139.233 Sistem Ralat/Pembetulan untuk Suatu Kegagalan Pelayanan

Penyedia layanan PKP-PK harus memiliki sistem untuk meralat atau membetulkan suatu kesalahan atau kegagalan yang mengakibatkan terjadi atau mungkin terjadinya suatu gangguan pelayanan atau penurunan standar pelayanan PKP-PK sesuai dengan Standar Teknis dan Operasi (*Manual of Standard/MOS*) Bagian 139.

139.235 *Quality Control*

Penyedia layanan PKP-PK harus memiliki suatu sistem untuk menjamin bahwa pelayanan yang diberikan adalah sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam PKPS Bagian 139 Sub Bagian I dan/atau petunjuk teknis dalam Peraturan Direktur Jenderal.

139.237 Manajemen Keselamatan (*Safety Management*)

Penyelenggara bandar udara harus memiliki suatu sistem untuk menjamin pelayanan PKP-PK yang diberikan sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan.

139.239 Pemberitahuan tentang perubahan-perubahan kepada Direktur Jenderal Perhubungan Udara

1. Penyedia pelayanan PKP-PK harus memiliki suatu prosedur pemberian informasi keselamatan yang terkait dengan perubahan, kesalahan, atau pemutusan pemberian pelayanan PKP-PK sesuai dengan Pedoman Pengoperasian Bandar Udara.

2. Prosedur untuk pelaporan informasi aeronautika kepada lembaga yang membidangi *NOTAM Office* harus mematuhi persyaratan dari Direktorat Jenderal Perhubungan Udara.
3. Untuk bandar udara bersertifikat atau beregister, prosedur pemberitahuan perubahan tercantum dalam Pedoman Pengoperasian Bandar Udara.

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BUDI KARYA SUMADI

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRU HUKUM,



WAHJU ADJI H., SH., DESS
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19651022-199203 1 001

APPENDIX 1 *ITEM-ITEM YANG DIMASUKKAN DALAM BUKU PEDOMAN PENGOPERASIAN BANDAR UDARA (AERODROME MANUAL)*

Buku Pedoman Pengoperasian Bandar Udara untuk bandar udara yang bersertifikat berisi setidaknya data atau informasi yang mengacu pada masing-masing bagian dan subbagian.

Bab I *Informasi Umum (General Information)*

Pada bagian ini Buku Pedoman Pengoperasian Bandar Udara sekurang-kurangnya memuat informasi umum tentang:

- a. lingkup dan tujuan dari Pedoman Pengoperasian Bandar Udara;
- b. dasar hukum sertifikat bandar udara dan Pedoman Pengoperasian Bandar Udara sebagaimana dijelaskan sebelumnya dalam Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil (PKPS) Bagian 139 tentang Bandar Udara;
- c. status dan penggunaan bandar udara, termasuk suatu pernyataan yang menunjukkan pemenuhan terhadap ketentuan *article* 15 dari Konvensi Chicago, antara lain tentang penggunaan bandar udara yang berlaku sama tanpa ada perbedaan perlakuan;
- d. tersedianya sistem informasi aeronautika dan prosedur penyebarannya;
- e. sistem pencatatan pergerakan pesawat udara; dan
- f. tanggung jawab penyelenggara bandar udara.

Bab II *Data atau Informasi Lokasi Bandar Udara (Aerodrome Data)*

Data atau informasi lokasi bandar udara sekurang-kurangnya memuat tentang:

- a. Gambar lokasi bandar udara yang menunjukkan fasilitas utama bandar udara termasuk penunjuk arah angin (*wind direction indicator*) untuk pengoperasian bandar udara.
- b. Gambar lokasi bandar udara yang menunjukkan batas-batas daerah lingkungan kerja bandar udara.
- c. Gambar lokasi yang memperlihatkan jarak bandar udara ke kota terdekat atau tempat lain yang berpenduduk padat, serta lokasi fasilitas bandar udara dan peralatan yang ada di luar daerah lingkungan kerja bandar udara.
- d. Dan lain-lain:
 - Sertifikat tanah lokasi bandar udara atau bukti kepemilikan dan penguasaan atas tanah, serta batas-batas tanah lokasi bandar udara.
 - Bilamana batas-batas daerah lingkungan kerja bandar udara tidak ditetapkan dalam sertifikat tanah, keterangan secara rinci mengenai pengawasan atas kepemilikan tanah di lokasi bandar udara itu berada, dan gambar lokasi yang menunjukkan batas-batas dan posisi dari bandar udara.

Bab III *Data atau Informasi yang dilaporkan kepada Pelayanan Informasi Aeronautika (Aeronautical Information Service/AIS)*

3.1 *Informasi umum*

Informasi tentang bandar udara, meliputi:

- a. indikator lokasi bandar udara;
- b. nama bandar udara;
- c. nama kota dimana pelayanan bandar udara diberikan;

- d. lokasi bandar udara berupa koordinat titik referensi bandar udara (*Airport Reference Point*) dalam sistem koordinat WGS - 84;
- e. arah dan jarak ke kota;
- f. elevasi bandar udara dalam MSL atau undulasi geoid;
- g. elevasi dari :
 - masing-masing *threshold* dalam MSL atau undulasi geoid; dan
 - elevasi tertinggi dari *Touch Down Zone* pada *precision approach runway*.
- h. temperatur bandar udara;
- i. rincian bandar udara *beacon*;
- j. nama penyelenggara bandar udara beserta alamat dan nomor telepon yang bisa dihubungi setiap saat, telefax, telex, email dan AFTN;
- k. informasi lain yang penting antara lain:
 - jam operasi bandar udara;
 - pelayanan darat yang tersedia;
 - PKP-PK;
 - prosedur khusus (bila ada); dan
 - informasi lokal atau peringatan dini (bila ada).

3.2 Dimensi Bandar Udara dan Informasi yang terkait

Pada subbagian 3.2 informasi yang diperlukan adalah kumpulan informasi tentang karakteristik *runway* dan dimensi-dimensi yaitu:

- a. arah *runway* sebenarnya, nomor arah *runway*, panjang, lebar, kemiringan memanjang (*slope*), lokasi *displaced threshold* bila ada, jenis permukaan *runway*, jenis *runway*, dan keberadaan suatu *obstacle free zone* untuk keperluan *precision approach runway*;
- b. panjang, lebar dan jenis permukaan dari bahu *runway* (*runway strip*), *runway end safety area* dan *stopway* bila ada;
- c. panjang, lebar, dan jenis permukaan dari landas hubung (*taxiway*);
- d. jenis permukaan *apron* beserta tempat parkir pesawat (*aircraft stand*);
- e. panjang *clearway* dan profil permukaan tanah;
- f. alat bantu visual-tipe *approach lighting*, *visual approach slope indicator system*, marka dan *lighting* untuk *runway*, *taxiway* dan *apron*, jenis *docking guidance system* serta ketersediaan *standby power*;
- g. lokasi dan frekuensi VOR;
- h. lokasi dan *designation* tiap standar *taxi route*;
- i. koordinat geografis dari masing-masing *threshold*;
- j. koordinat geografis dari masing-masing garis titik tengah *taxiway*;
- k. koordinat geografis tempat parkir pesawat udara (*aircraft stand*);
- l. koordinat geografis dan elevasi puncak dari *obstacle* yang ada di daerah *approach* dan permukaan *take-off climb*, di daerah *circling*, dan disekitar bandar udara;
- m. jenis permukaan daerah perkerasan dan daya dukung *runway* menggunakan metode *Aircraft Classification Number - Pavement Classification Number* (ACN-PCN);
- n. *Declared distance* - untuk *Take-off Run Available (TORA)*, *Take-off Distance Available (TODA)*, *Accelerate Stop Distance Available (ASDA)* dan *Landing Distance Available (LDA)* untuk masing-masing arah *runway*;
- o. tata cara pemindahan pesawat udara yang rusak (*disable aircraft removal plan*);
- p. Pertolongan Kecelakaan Penerbangan dan Pemadam Kebakaran / PKP-PK (*Rescue and Fire Fighting*).

Bab IV Prosedur Pengoperasian Bandar Udara (*Aerodrome Operating Procedures*)

4.1 Sistem Pelaporan

Prosedur-prosedur khusus untuk pelaporan perubahan yang terjadi pada informasi yang ditetapkan dalam AIP dan prosedur-prosedur untuk permintaan penerbitan *NOTAM*, meliputi hal-hal sebagai berikut:

- a. penyusunan laporan tentang setiap perubahan yang terjadi, yang dapat mempengaruhi pengoperasian pesawat udara kepada AIS, pelayanan pemandu lalu lintas penerbangan setempat, dan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara serta membuat catatan tentang perubahan pelaporan selama jam operasi maupun diluar jam operasi;
- b. penyusunan *Letter of Agreement (LOA)* atau sejenisnya dengan unit pelayanan informasi aeronautika di unit ATS bandar udara masing-masing atau di unit ATS yang melayaninya untuk memastikan mekanisme dan koordinasi penerbitan *NOTAM*;
- c. nama dan tanggung jawab petugas yang diberi wewenang untuk menangani perubahan pelaporan dan termasuk rinciannya, nomor telepon petugas yang dapat dihubungi selama jam operasi maupun diluar jam operasi; dan
- d. data lengkap dan rinci dari organisasi dan personel bilamana terjadi perubahan agar dilaporkan.

4.2 Akses ke dalam Daerah Pergerakan

Hal-hal penting dalam prosedur yang telah dikembangkan dan yang harus diikuti/dilaksanakan dengan berkoordinasi dengan unit kerja lain yang berwenang untuk mengawasi akses dan mencegah masuknya orang-orang yang tidak berhak, kendaraan, peralatan atau binatang ataupun sesuatu yang lain yang dapat membahayakan keselamatan operasi pesawat udara ke dalam daerah pergerakan (*movement area*), meliputi hal-hal sebagai berikut:

- a. peranan dan kewajiban/tanggung jawab penyelenggara bandar udara, operator pesawat udara, organisasi sekuriti, Direktorat Jenderal Perhubungan Udara dan kementerian/instansi pemerintah lain yang terkait; dan
- b. nama-nama dan peran dari personel yang bertanggung jawab untuk mengawasi akses ke dalam daerah pergerakan (*movement area*) beserta nomor telepon yang bisa dipakai untuk menghubungi mereka selama dan diluar jam operasi.

4.3 *Emergency Plan*

Bagian penting dalam suatu *Emergency Plan* meliputi sekurang-kurangnya hal-hal sebagai berikut:

- a. tata cara untuk menghadapi keadaan darurat/*emergency* yang terjadi di bandar udara atau di sekitar bandar udara yang meliputi tidak berfungsinya pesawat udara yang sedang terbang, kebakaran bangunan atau gedung, ancaman bom terhadap pesawat udara ataupun terhadap bangunan/instalasi penting, pembajakan selama dan sesudah keadaan darurat berlangsung;
- b. pengetesan/pengujian secara rinci fasilitas dan peralatan bandar udara yang dipakai untuk menanggulangi keadaan darurat/*emergency*, beserta pengaturan untuk menjaga agar fasilitas dan peralatan dimaksud selalu dalam keadaan siap, termasuk jangka waktu/frekuensi pengetesan/pengujian;

- c. pengaturan untuk diadakan tinjau ulang (*review*) dan pengetesan/pengujian terhadap *emergency plan* bandar udara;
- d. penggerakan/pengaktifan, pengendalian dan koordinasi organisasi pelayanan darurat, unit kerja dan personel yang berwenang, baik di dalam maupun di luar bandar udara, selama keadaan darurat, termasuk daftar lengkap setiap komponen *emergency plan*;
- e. pembentukan dan komposisi komite penanggulangan keadaan darurat bandar udara, dengan kewajiban/tanggung jawab fungsional, masing-masing (organisasi) anggota sekurang-kurangnya sampai dengan penyelenggaraan pelatihan, dan persiapan-persiapan lain dalam menghadapi keadaan darurat, antara lain:
 - 1) daftar lengkap organisasi pelayanan darurat yang mudah dihubungi dalam Komite Penanggulangan Keadaan Darurat;
 - 2) suatu penjabaran dari peranan masing-masing organisasi pelayanan darurat yang terlibat;
 - 3) respon operasional terhadap keadaan darurat, meliputi akses ke dalam bandar udara dan lokasi-lokasi tempat berkumpul (*assembly areas*);
 - 4) tanggap terhadap panggilan *local stand-by*;
 - 5) tanggap terhadap panggilan keadaan darurat penuh;
 - 6) pengaturan untuk kembali kepada status operasi normal setelah keadaan darurat; dan
 - 7) penunjukkan pimpinan operasi lapangan (*on-scene commander*), untuk keseluruhan operasi keadaan darurat.

4.4 Pertolongan Kecelakaan Pesawat Udara dan Pemadam Kebakaran (*Airport Rescue and Fire Fighting Service*)

Informasi tentang fasilitas, peralatan, personel dan prosedur untuk memenuhi persyaratan pemadam kebakaran, meliputi nama dan peranan personel yang bertanggung jawab terhadap pelayanan pertolongan kecelakaan penerbangan dan pemadam kebakaran di bandar udara.

4.5 Inspeksi atau Pemeriksaan di Daerah Pergerakan dan *Obstacle Limitation Surface*

Prosedur untuk inspeksi atau pemeriksaan di daerah pergerakan dan *Obstacle Limitation Surface*, meliputi sekurang-kurangnya:

- a. pengaturan inspeksi atau pemeriksaan rutin dan khusus di daerah pergerakan selama dan setelah jam kerja;
- b. pengaturan pelaksanaan pengujian friksi *runway* dan pengukuran *water depth* di *runway* dan *taxiway*;
- c. detail jeda waktu dan penjadwalan pelaksanaan inspeksi;
- d. pengaturan untuk penyimpanan dan pemeriksaan *logbook* dan tempat penyimpanan *logbook*;
- e. *checklist* inspeksi atau pemeriksaan;
- f. pengaturan untuk komunikasi dengan personel pemandu lalu lintas penerbangan selama pemeriksaan;
- g. pengaturan untuk pelaporan hasil pemeriksaan dan pengujian serta pengambilan tindakan; dan
- h. nama dan jabatan petugas yang bertanggung jawab untuk melaksanakan inspeksi serta nomor telepon yang dapat dihubungi selama dan setelah jam kerja.

4.6 Alat Bantu Visual (*Visual Aids*) dan Sistem Kelistrikan

Prosedur penting untuk inspeksi dan pemeliharaan bandar udara *lighting* (termasuk *obstacle lighting*), rambu, marka, dan sistem kelistrikan bandar udara (*Airport Electrical System*), termasuk *stand-by power supply* secara rinci meliputi hal-hal sebagai berikut:

- a. pengaturan pelaksanaan inspeksi selama atau diluar jam operasi normal bandar udara, beserta *checklist* untuk semua inspeksi;
- b. penyelenggaraan pencatatan hasil inspeksi dan pengujian, dan tindak lanjut berupa perbaikan terhadap kekurangan-kekurangan yang ditemukan;
- c. penyelenggaraan kinerja pelaksanaan pemeliharaan rutin dan darurat;
- d. pengaturan penyediaan *stand-by power* atau cara khusus yang lain (bila ada), untuk menghadapi kegagalan sistem baik secara parsial maupun total;
- e. *Surface Movement Guidance Control System* (SMGCS) sudah sesuai dengan tingkat kepadatan dan visibilitas, serta pemasangan dan penempatannya sesuai dengan standard; dan
- f. Nama dan peranan personel yang bertanggung jawab melakukan inspeksi dan pemeliharaan terhadap bandar udara *lighting system*, beserta nomor telepon yang bersangkutan untuk dapat dihubungi selama dan sesudah jam operasi bandar udara.

4.7 Pemeliharaan Daerah Pergerakan (*Movement Area*)

Prosedur, fasilitas, dan peralatan yang dipergunakan untuk melaksanakan perawatan daerah pergerakan sekurang-kurangnya meliputi hal-hal sebagai berikut:

- a. penyelenggaraan perawatan daerah perkerasan;
- b. penyelenggaraan perawatan daerah tanpa perkerasan;
- c. penyelenggaraan perawatan *runway strip*, *taxiway strip*, dan
- d. penyelenggaraan perawatan sistem drainase bandar udara.

4.8 Penyelenggaraan Keselamatan Kerja (*Work Safety*)

Uraian dari prosedur-prosedur perencanaan dan pelaksanaan pekerjaan bandar udara secara aman/selamat, termasuk pekerjaan-pekerjaan yang mungkin harus dikerjakan secara mendadak di dalam atau di luar lingkungan daerah pergerakan, dan yang mungkin harus melewati/menembus ketinggian *obstacle limitation surface* adalah meliputi rincian sebagai berikut:

- a. persiapan suatu rancangan untuk mengidentifikasi daerah-daerah pada bandar udara yang terkena/mendapat giliran dikerjakan pada setiap tahapan pekerjaan, dan langkah-langkah yang mesti diambil untuk meyakinkan bahwa standar keselamatan terpenuhi;
- b. penyelenggaraan komunikasi dengan personel pemandu lalu lintas penerbangan dan dengan pesawat udara bila dianggap perlu, selama pelaksanaan pekerjaan;
- c. nama serta peranan dari personel dan organisasi yang bertanggung jawab terhadap perencanaan dan pelaksanaan pekerjaan, nomor telepon masing-masing yang bersangkutan, dan pengaturan hubungan komunikasi dengan mereka setiap saat;
- d. pengaturan pemberitahuan kepada operator pesawat udara dan pengguna bandar udara, tentang rencana pekerjaan dan nomor telepon para operator dan pengguna bandar udara dimaksud, untuk dapat dihubungi setiap saat selama dan sesudah jam operasi; dan
- e. daftar distribusi dari rencana pekerjaan (*work plan*).

4.9 Manajemen Operasi Apron

Manajemen operasi *apron* meliputi prosedur pengaturan parkir pesawat udara, yang terdiri dari:

- a. pengaturan antara pemandu lalu lintas penerbangan dan manajemen operasi *apron* berupa *Letter of Agreement (LOA)* atau sejenisnya dengan unit pelayanan informasi aeronautika di unit ATS bandar udara masing – masing atau di unit ATS bandar udara yang melayaninya untuk memastikan mekanisme dan koordinasi pengaturan parkir pesawat udara.
- b. pengaturan terhadap alokasi tempat parkir pesawat udara dan pemberituannya kepada operator pesawat udara (perusahaan penerbangan);
- c. pengaturan tentang memulai *start engine*, dan mendapatkan izin (*clearance*) untuk mulai *push-back*;
- d. inventarisasi dan uraian tentang *activation* dan *deactivation visual docking guidance system* yang dipergunakan di bandar udara;
- e. pelayanan *marshalling*;
- f. *leader (van) service* atau *follow me service*;
- g. nama beserta peranan dan nomor telepon pejabat/personel yang bertanggung jawab atas perencanaan dan pelaksanaan pengaturan parkir pesawat udara.

4.10 Manajemen Keselamatan Apron (*Apron Safety Management*)

Prosedur-prosedur yang termasuk dalam manajemen keselamatan *apron* antara lain meliputi :

- a. perlindungan terhadap *jet blast*;
- b. pengawasan terhadap pelaksanaan *safety precaution* pada saat kegiatan *refueling*;
- c. pengawasan kebakaran dan prosedur kebakaran (*fire extinguisher*) di *apron* pada saat pelayanan darat pesawat udara termasuk persyaratan adanya alat pemadam kebakaran dan personelnya telah terlatih;
- d. Koordinasi dan prosedur penyampaian informasi adanya kebakaran di apron, jika diperlukan, dengan unit PKP-PK;
- e. Penyapuan *apron*;
- f. Pembersihan *apron*;
- g. Penyelenggaraan pelaporan *incident* dan *accident* di *apron*; dan
- a. Penyelenggaraan audit melalui pelaksanaan *Safety Management System (SMS)*, terhadap pemenuhan keselamatan kepada semua badan hukum Indonesia yang bergerak di kegiatan penunjang bandar udara (*ground handling servicing*).

4.11 Pengawasan/Pengaturan Kendaraan di Sisi Udara

Prosedur-prosedur yang berlaku untuk pengawasan/pengaturan kendaraan darat di daerah pergerakan adalah meliputi:

- a. aturan berlalu lintas (prosedur pergerakan kendaraan), sarana penegakan aturan dimaksud;
- b. tata cara untuk memberi instruksi dan menguji para pengemudi, terkait dengan aturan berlalulintas dimaksud;
- c. tata cara untuk menerbitkan izin kendaraan dan izin mengemudi untuk operasi di sisi udara;
- d. sarana dan tata cara memaksakan kepatuhan/pemenuhan terhadap ketentuan/aturan; dan

- e. nama, peranan dan nomor telepon dari pejabat/personel yang bertanggung jawab terhadap pengawasan/pengaturan kendaraan di sisi udara.

4.12 Manajemen Bahaya Hewan Liar (*Wildlife Hazard Management*)

Prosedur yang berlaku untuk berhadapan dengan masalah bahaya yang ditimbulkan oleh keberadaan burung-burung atau hewan liar lain di atau dekat bandar udara terhadap operasi pesawat udara, meliputi:

- a. penyelenggaraan pemeriksaan terhadap adanya bahaya yang ditimbulkan oleh burung-burung atau hewan liar lain;
- b. prosedur untuk memastikan fasilitas dan penggunaan lahan yang ada di dalam bandar udara beserta pengembangannya tidak menjadi daya tarik keberadaan burung-burung atau hewan liar lain;
- c. koordinasi dengan Pemerintah Daerah/ instansi terkait untuk :
 - 1) memastikan fasilitas dan penggunaan lahan yang ada di sekitar bandar udara beserta pengembangannya tidak menjadi daya tarik keberadaan burung-burung dan hewan liar lain; dan
 - 2) membuat program pengelolaan keselamatan operasi bandar udara (*safety plan*) apabila terdapat keadaan lingkungan di sekitar bandar udara yang dapat membahayakan operasional pesawat udara (*hazard*).
- d. program sebagai upaya untuk mencegah dan meniadakan hazard keberadaan burung-burung dan hewan liar lain di dalam dan sekitar bandar udara (*wildlife hazard management*), termasuk mitigasi peningkatan atau potensi peningkatan adanya serangan burung atau hewan liar akibat pengembangan penggunaan lahan;
- e. program terkait *wildlife hazard management* harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Standar Teknis dan Operasi (*Manual of Standard/MOS*) Bagian 139 dan disampaikan kepada Direktur Jenderal; dan
- f. nama dan peranan pejabat/personel yang bertanggung jawab terhadap urusan bahaya yang ditimbulkan oleh keberadaan burung-burung dan hewan liar lain, beserta nomor telepon yang bersangkutan untuk dapat dihubungi baik pada jam operasi maupun sesudah jam operasi.

4.13 Pengawasan Terhadap *Obstacle* (*Obstacle Control*)

Prosedur-prosedur yang berkaitan dengan pengawasan terhadap objek-objek dalam bandar udara maupun di sekitar bandar udara yang berpotensi untuk menjadi atau yang sudah merupakan *obstacle*, yang berpengaruh terhadap keselamatan ataupun efisiensi operasi bandar udara, meliputi sekurang-kurangnya:

- a. melakukan pemantauan terhadap *obstacle limitation surface* dan *take-off surface chart type A* terkait adanya *obstacle*;
- b. melakukan pemantauan terhadap tumbuhnya bangunan-bangunan tinggi dalam batas horizontal dari *obstacle limitation surface*;
- c. melakukan pengawasan terhadap *obstacle* atau obyek yang potensial menjadi *obstacle* dalam wilayah bandar udara;
- d. melakukan pengawasan/pengaturan terhadap pengembangan bangunan baru di seputar bandar udara dengan melakukan kerja sama antara penyelenggara bandar udara, Direktorat Jenderal Perhubungan Udara serta Pemerintah Daerah setempat dan organisasi lain terkait, sehubungan dengan pemberian izin terhadap bangunan yang mungkin mengganggu *obstacle limitation surface*;
- e. menyampaikan kepada Direktur Jenderal tentang jenis/sifat dan lokasi *obstacle*, tentang adanya tambahan baru *obstacle* atau tentang

- pembongkaran *obstacle* untuk mendapatkan penanganan bila perlu, termasuk amandemen terhadap publikasi dalam AIP;
- f. prosedur untuk melakukan pemantauan terhadap objek baru atau perkembangan bangunan-bangunan di daerah-daerah yang ditunjuk oleh pembuat *instrument approach procedure*, bagi bandar udara yang mempunyai *instrument approach procedure*; dan
 - g. Nama, peranan, dan nomor telepon dari pejabat/personel yang bertanggung jawab atas pengawasan terhadap *obstacle (obstacle control)*.

4.14 Pemindahan Pesawat Udara Yang Rusak (*Disabled Aircraft Removal*)

Setiap bandar udara harus menetapkan prosedur rencana pemindahan pesawat udara yang rusak di daerah pergerakan pesawat udara dan lingkungan sekitar bandara.

4.15 Penanganan Barang/Bahan Berbahaya

Bagian-bagian dari prosedur untuk penanganan yang aman bagi barang-barang/bahan-bahan yang berbahaya (namun tidak termasuk yang diklasifikasikan sebagai barang/bahan berbahaya untuk diangkut dengan pesawat udara) di bandar udara, meliputi hal-hal sebagai berikut :

- a. nama-nama, nomor telepon dan peranan dari pejabat/personel yang menerima dan menangani barang-barang berbahaya dimaksud;
- b. penyediaan suatu lokasi khusus di bandar udara untuk disiapkan menjadi tempat penyimpanan bahan cair yang mudah terbakar (meliputi bahan bakar untuk pesawat udara) dan semua barang/bahan berbahaya lain; dan
- c. tata cara/metode yang diikuti dalam kegiatan penyerahan, penyimpanan, pembagian/pengisian dan penanganan barang/bahan dimaksud.

Catatan 1 : Barang-barang berbahaya terdiri dari bahan peledak, cairan dan benda padat mudah terbakar, cairan bersifat korosi, gas bertekanan tinggi, barang-barang bersifat magnetik atau radioaktif.

Catatan 2 : Penanganan barang-barang berbahaya dimasukkan ke dalam *Airport Emergency Plan*.

4.16 Operasi *Visibility* Rendah

Isi dari prosedur-prosedur yang dipakai untuk mengatur kegiatan darat di suatu bandar udara yang melakukan operasi pada *visibility* rendah yang diizinkan, meliputi hal-hal sebagai berikut:

- a. pengaturan tentang pengukuran *visibility* sepanjang *runway* dan melaporkan hasilnya kepada pemandu lalu lintas penerbangan, bila disyaratkan;
- b. penyelenggaraan pengaturan dan mengurangi seminimal mungkin kendaraan yang bergerak di daerah pergerakan, selama jangka waktu operasi *visibility* rendah;
- c. penyelenggaraan inspeksi terhadap *runway* selama jangka waktu pelaksanaan operasi *visibility* rendah;
- d. nama dan peranan pejabat/personel yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan operasi *visibility* rendah beserta nomor telepon yang bersangkutan untuk dapat dihubungi sepanjang jam operasi atau sesudah jam operasi bandar udara.

4.17 Perlindungan Terhadap Lokasi Radar dan Alat Bantu Navigasi

Bagian-bagian dari prosedur untuk perlindungan lokasi radar dan alat bantu navigasi yang terletak di bandar udara, untuk menjamin agar kinerjanya tidak menurun, adalah meliputi:

- a. melakukan pengawasan terhadap aktifitas yang dilakukan di dekat instalasi radar maupun instalasi alat bantu navigasi;
- b. berkonsultasi dan meminta kepada pihak yang melaksanakan instalasi alat bantu navigasi, agar memasang alat/tanda peringatan akan adanya radiasi *microwave* yang berbahaya; dan
- c. pemeliharaan tanah/lingkungan di sekitar instalasi radar maupun alat bantu navigasi.

Bab V Penyelenggaraan Administrasi Bandar Udara dan Sistem Manajemen Keselamatan Bandar Udara (*Aerodrome Administration and Safety Management System*)

5.1 Penyelenggaraan Bandar Udara

Bagian-bagian prosedur untuk penyelenggaraan bandar udara meliputi :

- a. struktur organisasi beserta bagan organisasi yang memperlihatkan nomenklatur jabatan dan nama pejabat yang menempati posisi bersangkutan;
- b. posisi manajemen yang bertanggung jawab terhadap operasi dan pemeliharaan bandar udara, termasuk tanggung jawab keuangan;
- c. kualifikasi/kompetensi dan pengalaman untuk posisi kepala bandar udara/general manager dan pejabat bidang keselamatan/operasi/teknik dalam struktur organisasi penyelenggara bandar udara;
- d. data lengkap (*contact detail*) pejabat/personel utama yang bertanggung jawab terhadap operasi bandar udara dan tugas-tugas keselamatan; dan
- e. data lengkap (*contact detail*) pejabat/personel yang bertugas sebagai pengawas manual (*manual controller*).

5.2 Komite Bandar Udara

Bagian penting dari masing-masing komite yang dibentuk untuk mengatur atau membantu pengoperasian bandar udara yang tercakup dalam Buku Pedoman Pengoperasian Bandar Udara, sekurang-kurangnya meliputi:

- a. nama komite dan identifikasi beserta data lengkap (*contact detail*) dari :
 - 1) pimpinan komite; dan
 - 2) anggota eksekutif senior lainnya.
- b. kerangka acuan, atau dokumen tentang hak dan kewajiban anggota komite, atau yang sejenisnya; dan
- c. jadwal pertemuan.

5.3 *Additional Mandatory Requirements*

Pedoman Pengoperasian Bandar Udara terdiri dari semua hal-hal yang terkait dengan persyaratan (*condition*), pengecualian (*exemption*), arahan, instruksi, laporan audit, dan lain-lainnya dari Direktur Jenderal mengenai masalah keselamatan antara lain pembentukan/pendirian, manajemen, operasi atau masalah perawatan bandar udara.

5.4 Sistem Manajemen Keselamatan Bandar Udara

Bagian-bagian penting dari Sistem Manajemen Keselamatan yang dibuat untuk memastikan bahwa semua persyaratan keselamatan dapat dipenuhi/diikuti, dan untuk mencapai perbaikan terus-menerus dalam kinerja keselamatan, meliputi hal-hal sebagai berikut:

- a. kebijakan dalam hal keselamatan, prosedur tentang manajemen keselamatan dan manajemen akuntabilitas mengenai proses operasional dan perawatan;
- b. struktur atau organisasi sistem manajemen keselamatan (*Safety Management System/SMS*) meliputi penentuan/pengisian personel, penentuan peranan kelompok atau individu dan tanggung jawab dalam masalah-masalah keselamatan serta adanya kelanjutan pemantauan keselamatan;
- c. pengembangan strategi dan perencanaan sistem manajemen keselamatan dan penyediaan metode/tata cara (meliputi identifikasi bahaya dan penilaian resiko) untuk mengawasi suatu resiko agar serendah mungkin, sementara semua standar lain yang berlaku, aturan atau perundangan tetap dapat diikuti/dipatuhi;
- d. penerapan sistem manajemen keselamatan yang meliputi penggunaan fasilitas/peralatan, metode dan prosedur untuk suatu penyampaian yang efektif dari berita-berita keselamatan dan pemberlakuan (*enforcement*) persyaratan-persyaratan keselamatan;
- e. usaha-usaha yang dilakukan untuk peningkatan keselamatan dan pencegahan kejadian/kecelakaan;
- f. investigasi, analisis dan pelaporan tentang suatu kejadian/kecelakaan, keluhan, kerusakan, kesalahan, perbedaan-perbedaan, dan kegagalan;
- g. tersedianya dokumentasi untuk semua fasilitas yang terkait dengan keselamatan (dijamin bahwa data tersimpan dalam keadaan lengkap dan berlaku/*current*), juga dokumentasi untuk masalah operasional dan perawatan, yang meliputi informasi tentang desain dan konstruksi daerah perkerasan untuk pergerakan pesawat udara, *aeronautical lighting*, dengan cara sedemikian, untuk dapat dengan cepat dan memudahkan pencarian data, termasuk peta-peta apabila diperlukan;
- h. aktifitas yang berkaitan dengan pelatihan dan kecakapan staf/personel dalam bidang keselamatan;
- i. memasukkan dan memberlakukan persyaratan-persyaratan keselamatan ke dalam kontrak kerja bandar udara; dan
- j. evaluasi dan pemantauan terhadap kinerja sistem manajemen keselamatan, yang meliputi: audit keselamatan internal, peninjauan *quality control* terhadap keselamatan.

APPENDIX 2A ITEM-ITEM YANG DIMASUKKAN DALAM BUKU PEDOMAN PENGOPERASIAN BANDAR UDARA BEREGISTER (REGISTERED AERODROME MANUAL)

Buku Pedoman Pengoperasian Bandar Udara untuk bandar udara yang beregister berisi setidaknya data atau informasi yang mengacu pada masing-masing bagian dan sub bagian.

Bab I Informasi Umum (*General Information*)

Pada bagian ini Buku Pedoman Pengoperasian Bandar Udara sekurang-kurangnya memuat informasi umum tentang:

- a. lingkup dan tujuan dari Pedoman Pengoperasian Bandar Udara;
- b. dasar hukum sertifikat bandar udara dan Pedoman Pengoperasian Bandar Udara sebagaimana dijelaskan sebelumnya dalam Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil (PKPS) Bagian 139 tentang bandar udara;
- c. status dan penggunaan bandar udara, termasuk suatu pernyataan yang menunjukkan pemenuhan terhadap ketentuan *article* 15 dari Konvensi Chicago, antara lain tentang penggunaan bandar udara yang berlaku sama tanpa ada perbedaan perlakuan;
- d. tersedianya sistem informasi aeronautika dan prosedur penyebarannya;
- e. sistem pencatatan pergerakan pesawat udara; dan
- f. tanggung jawab penyelenggara bandar udara.

Bab II Data atau Informasi Lokasi Bandar Udara

Data atau informasi lokasi bandar udara sekurang-kurangnya memuat tentang:

- a. Gambar lokasi bandar udara yang menunjukkan fasilitas utama bandar udara termasuk penunjuk arah angin (*wind direction indicator*) untuk pengoperasian bandar udara.
- b. Gambar lokasi bandar udara yang menunjukkan batas-batas daerah lingkungan kerja bandar udara.
- c. Gambar lokasi yang memperlihatkan jarak bandar udara ke kota terdekat atau tempat lain yang berpenduduk padat, serta lokasi fasilitas bandar udara dan peralatan yang ada di luar daerah lingkungan kerja bandar udara.
- d. Dan lain-lain:
 - Sertifikat tanah lokasi bandar udara atau bukti kepemilikan dan penguasaan atas tanah, serta batas-batas tanah lokasi bandar udara.
 - Bilamana batas-batas daerah lingkungan kerja bandar udara tidak ditetapkan dalam sertifikat tanah, keterangan secara rinci mengenai pengawasan atas kepemilikan tanah di lokasi bandar udara itu berada, dan gambar lokasi yang menunjukkan batas-batas dan posisi dari bandar udara.

Bab III Data atau Informasi Yang Dilaporkan Kepada Pelayanan Informasi Aeronautika (*Aeronautical Information Service/AIS*)

3.1 Informasi umum

Informasi tentang bandar udara, meliputi:

- a. indikator lokasi bandar udara;
- b. nama bandar udara;
- c. nama kota dimana pelayanan bandar udara diberikan;

- d. lokasi bandar udara berupa koordinat titik referensi bandar udara (*Airport Reference Point*) dalam sistem koordinat WGS - 84;
- e. arah dan jarak ke kota;
- f. elevasi bandar udara dalam MSL atau undulasi geoid;
- g. elevasi dari :
 - masing-masing *threshold* dalam MSL atau undulasi geoid;
 - elevasi tertinggi dari *Touch Down Zone* pada *precision approach runway*.
- h. temperatur bandar udara;
- i. rincian bandar udara *beacon*;
- j. nama penyelenggara bandar udara beserta alamat dan nomor telepon yang bisa dihubungi setiap saat, telefax, telex, email dan AFTN; dan
- k. informasi lain yang penting antara lain:
 - jam operasi bandar udara;
 - pelayanan darat yang tersedia;
 - PKP-PK;
 - prosedur khusus, bila ada;
 - informasi lokal atau peringatan dini bila ada.

3.2 Dimensi Bandar Udara dan Informasi yang terkait

Pada subbagian 3.2 informasi yang diperlukan adalah kumpulan informasi tentang karakteristik *runway* dan dimensi-dimensi yaitu:

- a. arah *runway* sebenarnya, nomor arah *runway*, panjang, lebar; kemiringan memanjang (*slope*), lokasi *displaced threshold* bila ada, jenis permukaan *runway*, jenis *runway*, dan keberadaan suatu *obstacle free zone* untuk keperluan *precision approach runway*;
- b. panjang, lebar dan jenis permukaan dari bahu *runway* (*runway strip*), *runway end safety area* dan *stopway* jika ada;
- c. panjang, lebar, dan jenis permukaan dari landas hubung (*taxiway*);
- d. jenis permukaan *apron* beserta tempat parkir pesawat (*aircraft stand*);
- e. panjang *clearway* dan profil permukaan tanah;
- f. alat bantu visual-tipe *approach lighting*, *visual approach slope indicator system*, marka dan *lighting* untuk *runway*, landas hubung dan *apron*, jenis *docking guidance system* serta ketersediaan *standby power*;
- g. lokasi dan frekuensi VOR;
- h. lokasi dan *designation* tiap standar *taxi route*;
- i. koordinat geografis dari masing-masing *threshold*;
- j. koordinat geografis dari masing-masing garis titik tengah *taxiway*;
- k. koordinat geografis tempat parkir pesawat udara (*aircraft stand*);
- l. koordinat geografis dan elevasi puncak dari *obstacle* yang ada di daerah *approach* dan permukaan *take-off climb*, di daerah *circling*, dan di sekitar bandar udara;
- m. jenis permukaan daerah perkerasan dan daya dukung *runway* menggunakan metode *Aircraft Classification Number-Pavement Classification Number* (ACN-PCN);
- n. lokasi dari *pre-flight altimeter check* yang dipersiapkan pada *apron* beserta elevasinya;
- o. *declare distance* - untuk *take off run available*, *take off distance available*, *accelerate stop distance available* dan *landing distance available* untuk masing-masing arah *runway*;
- p. tata cara pemindahan pesawat udara yang rusak (*disable aircraft removal plan*); dan
- q. Pertolongan Kecelakaan Penerbangan dan Pemadam Kebakaran / PKP-PK (*Rescue and Fire Fighting*).

Bab IV Prosedur Pengoperasian Bandar Udara (*Aerodrome Operating Procedures*)

4.1 Sistem Pelaporan

Prosedur-prosedur khusus untuk pelaporan perubahan yang terjadi pada informasi yang ditetapkan dalam AIP dan prosedur-prosedur untuk permintaan penerbitan *NOTAM*, meliputi hal-hal sebagai berikut:

- a. penyusunan laporan tentang setiap perubahan yang terjadi, yang dapat mempengaruhi pengoperasian pesawat udara kepada AIS, pelayanan pemandu lalu lintas penerbangan setempat, dan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara serta membuat catatan tentang perubahan pelaporan selama jam operasi maupun di luar jam operasi;
- b. penyusunan *Letter of Agreement (LOA)* atau sejenisnya dengan unit pelayanan informasi aeronautika di unit ATS bandar udara masing – masing atau di unit ATS bandar udara yang melayaninya untuk memastikan mekanisme dan koordinasi penerbitan *NOTAM*;
- c. nama dan tanggung jawab petugas yang diberi wewenang untuk menangani perubahan pelaporan dan termasuk rinciannya, nomor telepon petugas yang dapat dihubungi selama jam operasi maupun di luar jam operasi; dan
- d. data lengkap dan rinci dari organisasi dan personel bilamana terjadi perubahan agar dilaporkan.

4.2 Pemeriksaan di Daerah Pergerakan dan *Obstacle Limitation Surface*

Prosedur untuk pemeriksaan di daerah pergerakan dan *Obstacle Limitation Surface*, meliputi sekurang-kurangnya:

- a. pengaturan pemeriksaan rutin dan khusus di daerah pergerakan selama dan setelah jam kerja;
- b. pengaturan pelaksanaan pengujian friksi *runway* dan pengukuran *water depth* di *runway* dan *taxiway*;
- c. detil jeda waktu dan penjadwalan pelaksanaan inspeksi;
- d. pengaturan untuk penyimpanan dan pemeriksaan *logbook* dan tempat penyimpanan *logbook*;
- e. *checklist* pemeriksaan;
- f. pengaturan untuk komunikasi dengan personel pemandu lalu lintas penerbangan selama pemeriksaan;
- g. pengaturan untuk pelaporan hasil pemeriksaan dan pengujian serta pengambilan tindakan; dan
- h. nama dan jabatan petugas yang bertanggung jawab untuk melaksanakan inspeksi serta nomor telpon yang dapat dihubungi selama dan setelah jam kerja.

4.3 Pemeliharaan Daerah Pergerakan (*Movement Area*)

Prosedur, fasilitas, dan peralatan yang dipergunakan untuk melaksanakan perawatan daerah pergerakan sekurang-kurangnya meliputi hal-hal sebagai berikut:

- a. penyelenggaraan perawatan daerah perkerasan;
- b. penyelenggaraan perawatan daerah tanpa perkerasan; pPenyelenggaraan perawatan *runway strip*, *taxiway strip*, dan
- c. penyelenggaraan perawatan sistem drainase bandar udara.

Bab V Penyelenggaraan Administrasi Bandar Udara

5.1 Penyelenggaraan Bandar Udara

Bagian-bagian prosedur untuk penyelenggaraan bandar udara meliputi :

- a. struktur organisasi beserta bagan organisasi yang memperlihatkan nomenklatur jabatan dan nama pejabat yang menempati posisi bersangkutan;
- b. posisi manajemen yang bertanggung jawab terhadap operasi dan pemeliharaan bandar udara, termasuk tanggung jawab keuangan;
- c. data lengkap (*contact detail*) pejabat/personel utama yang bertanggung jawab terhadap operasi bandar udara dan tugas-tugas keselamatan; dan
- d. data lengkap (*contact detail*) pejabat/personel yang bertugas sebagai pengawas manual (*manual controller*).

5.2 Additional Mandatory Requirements

Pedoman Pengoperasian Bandar Udara terdiri dari semua hal-hal yang terkait dengan persyaratan (*condition*), pembebasan (*exemptions*), arahan, instruksi, laporan audit, dan lain-lainnya dari Direktur Jenderal mengenai masalah keselamatan antara lain pembentukan/pendirian, manajemen, operasi atau masalah perawatan bandar udara.

APPENDIX 2B **ITEM-ITEM YANG DIMASUKKAN DALAM BUKU PEDOMAN PENGOPERASIAN TEMPAT Pendaratan DAN LEPAS LANDAS HELIKOPTER (*HELIPORT MANUAL*)**

Buku Pedoman Pengoperasian Tempat Pendaratan dan Lepas Landas Helikopter (*Heliport Manual*) berisi setidaknya data atau informasi yang mengacu pada masing-masing bagian dan sub bagian.

Bab I Data dan Informasi Umum (*General Information*)

Pada bagian ini Buku Pedoman Pengoperasian Tempat Pendaratan dan Lepas Landas Helikopter (*Heliport Manual*) sekurang-kurangnya memuat informasi umum tentang:

- 1.1 Lingkup dan tujuan
- 1.2 Dasar hukum
- 1.3 Nama penyelenggara
- 1.4 Struktur organisasi dan manajemen penyelenggara
- 1.5 Sistem pencatatan pergerakan helikopter
- 1.6 Tanggung jawab penyelenggara
- 1.7 Pelayanan lalu lintas udara

Bab II Data dan Informasi Lokasi dan Fasilitas Tempat Pendaratan dan Lepas Landas Helikopter (*Heliport Data and Facilities*)

Data atau fasilitas Tempat Pendaratan dan Lepas Landas Helikopter (*Heliport*) sekurang-kurangnya memuat tentang:

- 2.1 Gambar lokasi yang menunjukkan fasilitas utama, termasuk *windsock*
- 2.2 Gambar lokasi terhadap bandara terdekat
- 2.3 Gambar desain teknis TLOF/FATO, termasuk *safety area* jika diterapkan
- 2.4 Data dan Informasi Lokasi dan tinggi *obstacle*
- 2.5 Data dan Informasi Fasilitas tempat pendaratan dan lepas landas helikopter

Bab III Standar Prosedur Pengoperasian Tempat Pendaratan dan Lepas Landas Helikopter (*Heliport Standard Operating Procedures*)

Standar prosedur pengoperasian tempat pendaratan dan lepas landas helikopter meliputi:

- 3.1 Standar prosedur pelayanan pendaratan dan lepas landas helikopter
- 3.2 Standar prosedur inspeksi daerah pergerakan
- 3.3 Standar prosedur pengaturan dan pengendalian *obstacle*
- 3.4 Standar prosedur pemeliharaan area pergerakan
- 3.5 Standar prosedur pelaporan
- 3.6 Standar prosedur keadaan darurat di *heliport*
- 3.7 Standar Prosedur Persiapan *Night Emergency Medevac* terkait Fasilitas Heliport (jika Heliport digunakan untuk malam hari)
- 3.8 Standar Prosedur Persiapan *Night Emergency Medevac* Terkait *Emergency Response* (ERP), (Jika *Heliport* digunakan untuk malam hari)

Bab IV Sistem Pelaporan (*Reporting System*)

Dalam sistem pelaporan sekurang – kurangnya memuat:

- 4.1 Penyusunan laporan setiap perubahan yang terjadi
- 4.2 Nama dan tanggung jawab petugas pelaporan
- 4.3 Data lengkap dan rinci organisasi dan personel bilamana terjadi perubahan agar dilaporkan

APPENDIX 2C

**ITEM-ITEM YANG DIMASUKKAN DALAM BUKU
PEDOMAN BANDAR UDARA PERAIRAN (WATER
AERODROME MANUAL)**

Bab I Informasi Umum (General Information)

Pada bab informasi umum sekurang-kurangnya memuat informasi umum tentang:

- 1.1 Lingkup;
- 1.2 Dasar hukum;
- 1.3 Nama penyelenggara bandar udara perairan (*water aerodrome*) beserta alamat dan nomor telepon yang bisa dihubungi setiap saat;
- 1.4 Struktur organisasi dan manajemen penyelenggara;
- 1.5 Sisitim pencatatan pergerakan pesawat udara;
- 1.6 Tanggung jawab penyelenggara bandar udara perairan (*water aerodrome*);
- 1.7 Struktur organisasi dan informasi personel/manajemen /penyelenggara bandar udara perairan.

Bab II Data dan Fasilitas Bandar Udara Perairan (Water Aerodrome Data and Facilities)

Pada bab ini data fasilitas bandar udara perairan (*water aerodrome*) sekurang-kurangnya memuat:

- 2.1 Gambar lokasi yang memperlihatkan jarak tempat bandar udara perairan (*water aerodrome*) ke bandar udara terdekat;
- 2.2 Gambar lokasi tempat bandar udar perairan (*water aerodrome*) yang menunjukkan fasilitas utama, termasuk arah angin (*wind direction indicator*) untuk penoperasian bandar udara perairan (*water aerodrome*);
- 2.3 Gambar desain teknis *water aerodrome*;
- 2.4 Lokasi dan tinggi obstacle berdasarkan koordinat titik referensi dalam system koordinat WGS-84;
- 2.5 Data fasilitas :
 - a. fasilitas *water operating area*;
 - b. fasilitas jalur *taxiway*;
 - c. fasilitas *apron/ramp*;
 - d. kolam putar / *turning basin*;
 - e. fasilitas dermaga tetap/dermaga apung;
 - f. tambatan apung (*mooring buoy*);
 - g. penghalang (*obstacle*);
 - h. lampu hambatan ;
 - i. lampu *water operating area* (jika digunakan untuk penerbangan malam);
 - j. lampu sorot (*flood light*), (jika digunakan untuk penerbangan malam);
 - k. lampu suar (*aerodrome beacon*), (jika digunakan untuk penerbangan malam);
 - l. alat bantu penentu cuaca dan kecepatan angin;
 - m. penunjuk arah angin (*wind direction indicator*);
 - n. fasilitas komunikasi dan navigasi penerbangan termasuk personel yang memiliki lisensi yang sah dan masih berlaku;
 - o. prosedur IAP, (jika digunakan untuk penerbangan malam); dan
 - p. PKP-PK.

Bab III Prosedur Pengoperasian Bandar Udara Perairan (*Water Aerodrome Operating Procedures*)

Pada bab standar prosedur pengoperasian bandar udara perairan (*water aerodrome*) sekurang-kurangnya memuat:

- 3.1 Standar prosedur pelayanan bandar udara perairan;
- 3.2 Standar prosedur inspeksi bandar udara perairan;
- 3.3 Standar prosedur pengaturan dan pengendalian *obstacle*;
- 3.4 Standar prosedur pemeliharaan daerah pergerakan bandar udara perairan; dan
- 3.5 Standar prosedur pelaporan bandar udara perairan.

Bab IV Sistem Pelaporan (*Reporting System*)

Pada bab sistem pelaporan, berisi prosedur khusus untuk pelaporan perubahan yang terjadi pada informasi yang ditetapkan dalam AIP dan prosedur – prosedur untuk permintaan *NOTAM*, meliputi :

- 1.1 Penyusunan pelaporan tentang setiap perubahan yang terjadi, yang dapat mempengaruhi pengoperasian pesawat udara kepada AIS serta membuat catatan tentang perubahan pelaporan selama jam operasi maupun diluar jam operasi;
- 1.2 Nama dan tanggung jawab petugas yang diberi wewenang untuk menangani perubahan untuk dilaporkan dan termasuk rinciannya, serta nomor telepon yang dapat dihubungi selama jam operasi maupun diluar jam operasi;
- 1.3 Data lengkap dan rinci terkait organisasi dan personel bilamana terjadi perubahan agar dilaporkan.

- g. Bukti Pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sesuai peraturan yang berlaku;
- h. Sertifikat/register bandar udara yang akan berakhir masa berlakunya; untuk perpanjangan.
- i. Hasil pemeriksaan teknis operasional berkala tahunan dan atau hasil pengawasan keselamatan operasi bandar udara (audit, inspeksi, pengamatan), untuk perpanjangan.

Demikian disampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Hormat kami

(.....)

Tembusan :

Direktur Bandar Udara.

**APPENDIX 4 PERSYARATAN UNTUK MENYELENGGARAKAN
PEMERIKSAAN KESELAMATAN BANDAR UDARA
BERSERTIFIKAT DAN BEREGISTER TERMASUK
HELIPORT DAN WATER AERODROME**

1. Penyelenggara bandar udara dalam melakukan inspeksi internal keselamatan bandar udara harus menunjuk personel inspeksi keselamatan yang memiliki kompetensi dan memenuhi persyaratan paling sedikit:
 - a) pendidikan sekurang-kurangnya D.III (Diploma - III);
 - b) memiliki pengalaman di bidang teknik dan/atau operasional penerbangan sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun;
 - c) telah mengikuti pelatihan *Aerodrome Inspector, Safety Management System (SMS)*, dan *T-BOSIET (Basic Offshore Safety Emergency Training)* untuk *heliport* beregister;
 - d) memiliki kemampuan bahasa inggris aktif yang dibuktikan dengan skor TOEFL minimal 450 dan masih valid;
 - e) memiliki sertifikat tanda lulus paling sedikit 3 (tiga) pelatihan dengan substansi di bidang keudaraan.

2. Apabila penyelenggara bandar udara tidak memiliki personel dengan kompetensi untuk melakukan inspeksi internal, maka dapat menunjuk Badan Hukum Indonesia yang telah diberi kewenangan/izin oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Udara sebagai pelaksana inspeksi keselamatan di Bandar Udara bersertifikat dan beregister termasuk *Heliport* dan *Water Aerodrome*.

3. Badan Hukum Indonesia yang mendapatkan izin dari Direktorat Jenderal Perhubungan Udara sebagaimana dimaksud dalam butir 2 (dua) harus memiliki persyaratan sebagai berikut:
 - a) Salinan (copy) akta pendirian perusahaan;
 - b) Salinan (copy) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - c) Salinan (copy) Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) bidang jasa konsultasi;
 - d) Surat keterangan domisili perusahaan;
 - e) Struktur organisasi perusahaan;
 - f) Surat pernyataan tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak bangkrut/pailit dan tidak sedang menjalani sanksi pidana;
 - g) Surat pernyataan kebenaran dokumen;
 - h) Pedoman inspeksi keselamatan (*safety inspection manual*);
 - i) Peralatan inspeksi keselamatan;
 - j) Personel inspeksi keselamatan yang berkompeten di bidangnya.

4. Izin penunjukan (*approval*) Badan Hukum Indonesia berlaku 3 (tiga) tahun. Badan Hukum Indonesia yang mendapat izin penunjukan pemeriksaan keselamatan bandar udara wajib melaporkan kegiatan inspeksi keselamatan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan kepada Direktorat Jenderal Perhubungan Udara.

5. Izin penunjukan tidak berlaku dalam masa penundaan/pencabutan, akan tetapi masa/periode penundaan dianggap sebagai bagian dari masa berlaku yang 5 tahun.

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BUDI KARYA SUMADI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

